

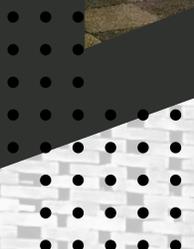
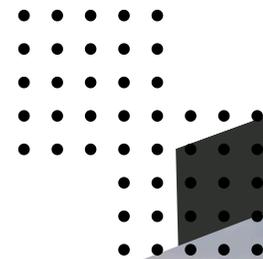


PEMERINTAH
KABUPATEN
MAJALENGKA

PERUBAHAN

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024





Daftar Isi

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024.....	1
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.....	4
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024.....	12
2.3 Rekomendasi.....	13
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	1
3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.....	1
3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024.....	1
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	1
3.1.1.2 Inflasi.....	3
3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	5
3.1.1.4 Gini Ratio.....	6
3.1.1.5 Kemiskinan.....	8
3.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2024..	9
3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi.....	15
3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	15
3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat.....	17
3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka.....	23



3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	26
3.2.1	Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2024.....	28
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024.....	32
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2024.....	37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....		1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	2
4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	2
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	9
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	12
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	15
4.2.1	Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	15
4.2.2	Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	18
4.2.3	Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka.....	19
4.2.4	Isu Strategis.....	22
4.2.5	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka	30
4.3	Kebijakan Pembangunan.....	99
4.3.1	Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang.....	103
4.3.2	Kebijakan Pengembangan Pola Ruang.....	105
4.3.3	Arah Pengembangan Kawasan Rebana	107
4.4	Inovasi Pembangunan.....	113
4.4.1	Inovasi pada Proses Perencanaan.....	113
4.4.2	Inovasi pada Proses Program/Kegiatan Perangkat Daerah.....	115
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....		1
5.1	Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024....	2



5.2 Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.....	5
BAB VI PENUTUP.....	1
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 2
Tabel 2.2	Capaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... 3
Tabel 2.3	Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2024..... 4
Tabel 2.4	Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD Tahun 2024 Triwulan II..... 6
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sub Kegiatan yang Tidak Ada Dalam RKPD dan APBD Pada Setiap OPD Triwulan II Tahun 2024..... 7
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dirinci Menurut Perangkat Daerah..... 8
Tabel 2.7	Realisasi Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2024 dirinci Menurut Urusan..... 10
Tabel 3.1	Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022..... 4
Tabel 3.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional..... 6
Tabel 3.3	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional..... 7
Tabel 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka..... 8
Tabel 3.5	Target Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... 13
Tabel 3.6	Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... 14
Tabel 3.7	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024..... 15
Tabel 3.8	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 17
Tabel 3.9	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 23



Tabel 3.10	Proyeksi Indikator Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	25
Tabel 3.11	Target Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	31
Tabel 3.12	Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024	36
Tabel 3.13	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	38
Tabel 4.1	Rumusan, Tujuan dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	13
Tabel 4.2	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	15
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	15
Tabel 4.4	Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024.....	18
Tabel 4.5	Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	19
Tabel 4.6	Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	23
Tabel 4.7	Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	34
Tabel 4.8	Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2024.....	35
Tabel 4.9	Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2024 dan Sasaran RKPD 2024 Kabupaten Majalengka.....	36
Tabel 4.10	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	38
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka.....	43
Tabel 4.12	Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024.....	52



Tabel 4.13	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN.....	97
Tabel 4.14	Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka.....	103
Tabel 4.15	Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka.....	106
Tabel 4.16	Proyek dan Program Kawasan rebana di Kabupaten Majalengka.....	109
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024.....	6





Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional.....	3
Gambar 3.2 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan nasional Tahun 2018-2022.....	4
Gambar 3.3 Inflasi Kabupaten Majalengka Sampai Dengan Bulan April Tahun 2024.....	5
Gambar 3.4 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka...	7
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	2
Gambar 4.2 Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.....	35
Gambar 4.3 Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI.....	114
Gambar 4.4 Tampilan Muka Aplikasi E-Renja.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Majalengka pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi target pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024, yaitu:

1. Penyesuaian target Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat dari kegiatan/sub kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026;
4. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024;
2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024;
3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2024.

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;



3. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta penyesuaian capaian target indikatornya; dan
4. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);



12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236)



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama pembangunan Kabupaten Majalengka dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang perubahan Perubahan RKPD Tahun 2024, dasar hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.



BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan Permasalahan Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Majalengka.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, kebijakan pembangunan, inovasi pembangunan daerah di Kabupaten Majalengka yang menjadi unggulan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

BAB VI : PENUTUP

Memuat tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Substansi dasar pelaksanaan evaluasi dilakukan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori prioritas pembangunan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan menggunakan aplikasi *E-Monev*, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi (*performance result*) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat *performance gap* yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan



gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator *output* dan *outcome*. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-E.1.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah:



“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Adapun capaian pada pelaksanaan masing-masing indikator tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Tujuan & Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				2024	2024	
1.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Gini	Poin	0,329	N/A	N/A
		IPM	Poin	68,9	N/A	N/A
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,56	N/A	N/A
1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,61	N/A	N/A
1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	78,5	N/A	N/A
		Prevalensi Stunting	Persen	3,25	N/A	N/A
2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,72	N/A	N/A
		Inflasi	Persen	3,97	N/A	N/A
2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	65,18	N/A	N/A
2.2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,08	N/A	N/A
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	27,58	N/A	N/A
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44	N/A	N/A
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	C	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	N/A	N/A
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	N/A	N/A
3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	N/A	N/A

Sumber: Laporan Renja PD Kab. Majalengka Tahun 2024, diolah.



2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

A. Perbandingan Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran dalam RKPD dan APBD

Rekapitulasi pagu indikatif RKPD terhadap APBD Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD dan Alokasi APBD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Pagu APBD Parsial	% APBD terhadap RKPD
1	Dinas Pendidikan	1.154.972.253.047	1.109.299.408.289	96,05
2	Dinas Kesehatan	290.732.009.270	229.695.960.814	79,01
3	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	169.477.211.963	216.056.526.233	127,48
4	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	236.338.573.569	177.070.794.113	74,92
5	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	-	20.000.000.000	0,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	283.310.344.460	181.214.058.008	63,96
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	27.684.152.708	37.001.369.524	133,66
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.980.674.805	5.032.768.412	101,05
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.438.117.311	17.367.632.889	99,60
10	Dinas Sosial	18.618.904.600	12.186.926.696	65,45
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23.423.521.576	26.964.629.298	115,12
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12.773.872.590	20.603.238.006	161,29
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	46.328.112.370	49.870.403.680	107,65
14	Dinas Lingkungan Hidup	15.945.115.438	16.802.883.271	105,38
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.949.330.500	7.417.244.790	106,73
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.733.089.800	21.443.927.693	114,47
17	Dinas Perhubungan	39.801.887.282	23.271.064.806	58,47
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.655.724.500	7.201.000.252	108,19
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.592.364.546	6.185.549.616	93,83
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	18.036.817.664	21.427.730.682	118,80
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	16.643.364.145	5.219.959.078	31,36
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.578.975.582	9.056.305.262	85,61
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.227.704.831	10.975.508.867	107,31



No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Pagu APBD Parsial	% APBD terhadap RKPD
24	Sekretariat Daerah	73.408.472.692	75.545.996.227	102,91
25	Sekretariat DPRD	56.829.117.972	76.961.638.384	135,43
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.633.724.350	11.500.522.880	119,38
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.653.066.484	499.272.986.726	1742,48
28	Badan Pendapatan Daerah	12.675.129.050	18.293.897.323	144,33
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.964.801.700	22.466.055.385	112,53
30	Inspektorat	11.832.602.400	12.023.864.987	101,62
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.746.138.167	41.332.654.014	79,88
32	Kecamatan Argapura	2.674.265.500	2.670.799.597	99,87
33	Kecamatan Banjaran	2.490.357.600	2.393.268.463	96,10
34	Kecamatan Bantarujeg	2.325.009.600	2.315.693.379	99,60
35	Kecamatan Cigasong	6.521.565.500	6.561.864.176	100,62
36	Kecamatan Cikijing	2.391.686.550	2.408.548.489	100,71
37	Kecamatan Cingambul	2.699.373.600	2.690.758.719	99,68
38	Kecamatan Dawuan	2.283.354.700	2.527.018.196	110,67
39	Kecamatan Jatitujuh	2.683.828.100	2.619.518.142	97,60
40	Kecamatan Jatiwangi	4.583.035.100	3.150.196.126	68,74
41	Kecamatan Kadipaten	2.735.380.400	2.695.726.318	98,55
42	Kecamatan Kasokandel	2.282.614.600	2.348.806.403	102,90
43	Kecamatan Kertajati	2.813.870.900	2.736.121.996	97,24
44	Kecamatan Lemahsugih	2.253.542.100	2.209.272.492	98,04
45	Kecamatan Leuwimunding	2.292.273.000	2.269.874.770	99,02
46	Kecamatan Ligung	2.878.693.000	2.926.805.308	101,67
47	Kecamatan Maja	2.661.454.300	2.627.034.971	98,71
48	Kecamatan Majalengka	15.841.168.337	16.306.523.800	102,94
49	Kecamatan Malausma	2.262.567.100	2.312.280.622	102,20
50	Kecamatan Palasah	2.259.164.600	2.121.723.817	93,92
51	Kecamatan Panyingkiran	2.011.622.000	2.047.149.293	101,77
52	Kecamatan Rajagaluh	2.733.663.500	2.786.409.634	101,93
53	Kecamatan Sindang	2.398.764.700	2.447.821.232	102,05
54	Kecamatan Sindangwangi	2.723.592.000	2.702.624.957	99,23
55	Kecamatan Sukahaji	2.610.512.500	2.591.103.279	99,26
56	Kecamatan Sumberjaya	1.989.237.612	2.089.071.534	105,02
57	Kecamatan Talaga	2.400.106.500	2.471.203.395	102,96
TOTAL		2.784.785.878.771	3.071.789.725.313	110,31

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024, TW 2.

Dari Tabel 2.1 di atas diketahui untuk jumlah pagu indikatif yang direncanakan di RKPD oleh tiap PD tidak ada yang sama dengan pagu yang ditetapkan dalam APBD ini dan total pagu APBD sebesar 110,31 persen lebih besar dibandingkan yang direncanakan dalam RKPD.



Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja untuk pagu Program dan Kegiatan termasuk interval $91\% \leq 100\%$, dengan kriteria **Sangat Tinggi**: menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Adanya peningkatan pada APBD dipengaruhi oleh pendapatan anggaran dari sumber dana Dana Alokasi Khusus.

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang jumlah Program/Kegiatan di RKPD dibandingkan dengan Program/Kegiatan di APBD, maka jumlah Program/Kegiatan masing-masing PD dan Kecamatan dirinci seperti diuraikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD
Tahun 2024 Triwulan II

RKPD			APBD		
JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN	JML PROGRAM	JML KEGIATAN	JML SUB KEGIATAN
118	222	596	118	222	608

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024, TW 2.

Dari tabel 2.2 di atas diketahui bahwa tingkat kesesuaian jumlah program dan kegiatan APBD terhadap RKPD untuk jumlah program mencapai 100%, sedangkan untuk jumlah kegiatan mencapai 100%. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja untuk Pagu Program dan kegiatan termasuk interval 91-100%, dengan kriteria sangat tinggi: menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian sudah memenuhi target dan berada di atas pencapaian kinerja yang diharapkan.

Jika dibandingkan dengan jumlah total sub kegiatan yang ada dalam RKPD sebesar 596 sub kegiatan dan APBD sebesar 608 sub kegiatan, maka prosentase sub kegiatan yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2024 mencapai 2%.



Terdapatnya sub kegiatan pada APBD yang tidak ada di RKPD disebabkan adanya pemutakhiran nomenklatur dalam SIPD dan penyesuaian terhadap pemanfaatan dana transfer (DAK dan Bankeu).

Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2024, diperoleh rekapitulasi kegiatan APBD yang tidak ada di dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sub Kegiatan Yang Tidak Ada Dalam RKPD dan APBD Pada Setiap OPD Triwulan II Tahun 2024

No	Kode	Sub Kegiatan	OPD	Keterangan
1	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	RKPD 2024 disusun dan ditetapkan bulan Juli 2023 sementara URK DAK tetapkan di bulan Desember 2023.
2	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Untuk kegiatan pengadaan alat praktik disaat perencanaan awal adalah bantuan personil peserta didik pada saat parsiall diubah menjadi pengadaan alat dan peraga. (Pergeseran kegiatan)
3	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	RKPD 2024 disusun dan ditetapkan bulan Juli 2023 sementara URK DAK tetapkan di bulan Desember 2023.
4	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
5	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	
6	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	
7	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sub Kegiatan ini tidak dimunculkan pada RKPD 2024 dan baru diketahui setelah APBD ditetapkan
8	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sub Kegiatan ini sesuai dengan pemetaan sub kegiatan dari BKKBN termasuk dengan kemendagri. Sumberdana na DAK non Fisik BOKB dan baru dimutakhirkan setelah RKPD 2024 di sahkan.
9	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
10	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	



No	Kode	Sub Kegiatan	OPD	Keterangan
11	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
12	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sumber dana DAK, dalam pemutakhiran SIPD pada tahun 2023 belum muncul subkegiatan ini.

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024, TW 2.

C. Capaian Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dan APBD

Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024, diperoleh Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024 dirinci menurut PD dan Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dirinci Menurut Perangkat Daerah

NO	NAMA	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II		
			REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)
1	2	3	4	5	6
	OPD				
1	Dinas Pendidikan	1.109.299.408.289	423.128.061.146	31	11
2	Dinas Kesehatan	229.695.960.814	68.497.418.576	55	25
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	216.056.526.233	79.853.401.543	30	23
4	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	177.070.794.113	54.262.422.890	23	20
5	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga	20.000.000.000	1.835.705.736	50	9
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	181.214.058.008	31.511.807.921	30	13
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37.001.369.524	6.678.241.681	50	41
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.032.768.412	2.339.712.623	22	38
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.367.632.889	6.853.250.102	19	13
10	Dinas Sosial	12.186.926.696	3.713.106.138	36	36
11	Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26.964.629.298	3.412.830.533	23	22
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.603.238.006	6.790.684.492	11	12
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	49.870.403.680	17.879.789.164	8	13
14	Dinas Lingkungan Hidup	16.802.883.271	7.210.833.806	29	29
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.417.244.790	3.302.944.218	5	4
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.443.927.693	5.930.100.605	27	26
17	Dinas Perhubungan	23.271.064.806	10.787.794.534	26	37
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.201.000.252	3.303.998.727	59	46
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.185.549.616	2.725.933.930	24	25
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	21.427.730.682	7.607.086.617	49	44
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	5.219.959.078	2.159.952.068	18	13
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.056.305.262	4.196.196.214	18	15
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.975.508.867	4.766.365.692	32	27
24	Sekretariat Daerah	75.545.996.227	33.083.319.593	18	21
25	Sekretariat DPRD	76.961.638.384	31.606.788.339	28	20
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.500.522.880	4.834.462.085	37	13
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	499.272.986.726	240.323.536.563	28	24



NO	NAMA	ANGGARAN	REALISASI TRIWULAN II		
			REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)
28	Badan Pendapatan Daerah	18.293.897.323	4.922.432.084	22	21
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.466.055.385	8.078.713.466	70	19
30	Inspektorat	12.023.864.987	5.141.699.007	29	25
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.332.654.014	31.309.974.525	29	30
KECAMATAN					
31	Kecamatan Argapura	2.670.799.597	1.312.292.336	53	50
32	Kecamatan Banjaran	2.393.268.463	1.129.353.046	69	69
33	Kecamatan Bantarujeg	2.315.693.379	1.136.357.462	18	18
34	Kecamatan Cigasong	6.561.864.176	2.595.301.302	7	6
35	Kecamatan Cikijing	2.408.548.489	1.119.836.716	20	19
36	Kecamatan Cingambul	2.690.758.719	1.360.538.809	54	46
37	Kecamatan Dawuan	2.527.018.196	1.121.531.443	7	6
38	Kecamatan Jatitujuh	2.619.518.142	1.129.119.598	26	24
39	Kecamatan Jatiwangi	3.150.196.126	1.555.312.744	53	42
40	Kecamatan Kadipaten	2.695.726.318	1.297.623.486	47	51
41	Kecamatan Kasokandel	2.348.806.403	1.215.131.423	48	48
42	Kecamatan Kertajati	2.736.121.996	1.294.380.258	50	48
43	Kecamatan Lemahsugih	2.209.272.492	1.109.658.643	71	69
44	Kecamatan Leuwimunding	2.269.874.770	1.131.816.723	30	28
45	Kecamatan Ligung	2.926.805.308	1.349.807.161	20	16
46	Kecamatan Maja	2.627.034.971	1.214.702.601	75	74
47	Kecamatan Majalengka	16.306.523.800	7.554.462.775	61	44
48	Kecamatan Malausma	2.312.280.622	1.081.838.555	34	33
49	Kecamatan Palasah	2.121.723.817	989.377.540	41	41
50	Kecamatan Panyingkiran	2.047.149.293	935.175.080	63	39
51	Kecamatan Rajagaluh	2.786.409.634	1.326.281.218	51	49
52	Kecamatan Sindang	2.447.821.232	1.090.318.450	20	18
53	Kecamatan Sindangwangi	2.702.624.957	1.358.509.665	33	30
54	Kecamatan Sukahaji	2.591.103.279	1.224.918.104	82	14
55	Kecamatan Sumberjaya	2.089.071.534	938.815.276	35	36
56	Kecamatan Talaga	2.471.203.395	1.228.506.510	35	35
TOTAL		3.071.789.725.313	1.156.849.531.542	36	29

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024, TW 2.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat capaian rata-rata realisasi fisik mencapai 36% sedangkan untuk realisasi keuangan yang terserap dari seluruh Perangkat Daerah sebesar 29% atau sejumlah Rp. 1.156.849.531.542 dari alokasi anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 3.071.789.725.313. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Skala Nilai Peringkat Kinerja: untuk Kinerja termasuk interval $\leq 50\%$ dengan kriteria **Sangat Rendah**. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan demikian, pada triwulan berikutnya Perangkat Daerah harus lebih fokus dalam mencapai target sehingga capaian pada semester 1 ini menjadi tolok ukur untuk penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2024 sehingga pada triwulan selanjutnya mampu mencapai sesuai



apa yang telah di targetkan. Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2.7
Realisasi Kinerja Fisik dan Kinerja Keuangan Triwulan II
Tahun 2024 dirinci Menurut Urusan

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
A	URUSAN WAJIB	2.194.965.764.420	750.554.759.956	35	Sangat Rendah	34	Sangat Rendah
I	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	2.003.126.910.392	673.764.583.468	37	Sangat Rendah	34	Sangat Rendah
1	Pendidikan	1.109.299.408.289	423.128.061.146	35	Sangat Rendah	9	Sangat Rendah
2	Kesehatan	642.823.281.160	204.448.968.745	47	Sangat Rendah	24	Sangat Rendah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	207.601.987.008	33.769.891.921	47	Sangat Rendah	26	Sangat Rendah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.814.905.938	3.224.698.931	36	Sangat Rendah	9	Sangat Rendah
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	22.400.401.301	9.192.962.725	18	Sangat Rendah	22	Sangat Rendah
6	Sosial	12.186.926.696	3.713.106.138	38	Sangat Rendah	38	Sangat Rendah
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	191.838.854.028	76.790.176.488	32	Sangat Rendah	40	Sangat Rendah
1	Tenaga Kerja	25.251.211.898	3.282.718.733	6	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.126.420.006	2.279.960.992	7	Sangat Rendah	7	Sangat Rendah
3	Pangan	32.672.462.950	16.860.400.163	55	Rendah	50	Sangat Rendah
4	Pertanahan	1.878.534.586	1.195.458.750	56	Rendah	64	Rendah
5	Lingkungan Hidup	16.802.883.271	7.210.833.806	28	Sangat Rendah	29	Sangat Rendah
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	7.417.244.790	3.302.944.218	56	Rendah	50	Sangat Rendah
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.443.927.693	5.930.100.605	20	Sangat Rendah	20	Sangat Rendah
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.476.818.000	4.510.723.500	12	Sangat Rendah	13	Sangat Rendah
9	Perhubungan	23.271.064.806	16.125.062.579	7	Sangat Rendah	14	Sangat Rendah
10	Komunikasi dan Informatika	6.979.000.352	3.198.498.727	54	Rendah	41	Sangat Rendah
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.713.417.400	130.111.800	33	Sangat Rendah	32	Sangat Rendah
12	Penanaman Modal	6.185.549.616	2.725.933.930	22	Sangat Rendah	25	Sangat Rendah



No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
13	Kepemudaan dan Olahraga	21.427.730.682	7.607.086.617	52	Rendah	48	Sangat Rendah
14	Statistik	140.999.900	68.600.000	75	Sedang	55	Rendah
15	Kebudayaan	750.629.000	164.890.000	20	Sangat Rendah	9	Sangat Rendah
16	Perpustakaan	153.367.000	36.504.000	26	Sangat Rendah	18	Sangat Rendah
17	Kearsipan	5.066.592.078	2.123.448.068	5	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah
18	Persandian	81.000.000	36.900.000	50	Sangat Rendah	46	Sangat Rendah
III	URUSAN PILIHAN	36.479.125.859	9.817.060.907	26	Sangat Rendah	27	Sangat Rendah
1	Kelautan dan Perikanan	337.192.330	160.569.001	16	Sangat Rendah	22	Sangat Rendah
2	Pariwisata	8.305.676.262	4.031.306.214	43	Sangat Rendah	47	Sangat Rendah
3	Pertanian	16.860.748.400	858.820.000	2	Sangat Rendah	10	Sangat Rendah
4	Kehutanan	-	-	-	-	-	-
5	Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-	-	-
6	Perdagangan	10.446.144.867	4.695.588.692	42	Sangat Rendah	32	Sangat Rendah
7	Perindustrian	529.364.000	70.777.000	25	Sangat Rendah	22	Sangat Rendah
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	563.477.327.301	261.676.661.298	44	Sangat Rendah	46	Sangat Rendah
1	Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
2	Pengawasan	-	-	-	-	-	-
3	Perencanaan	11.026.427.780	4.809.192.085	46	Sangat Rendah	21	Sangat Rendah
4	Keuangan	517.486.884.049	243.886.074.850	20	Sangat Rendah	19	Sangat Rendah
5	Kepegawaian	20.855.055.385	7.814.425.356	26	Sangat Rendah	12	Sangat Rendah
6	Penelitian dan Pengembangan	474.095.100	25.270.000	33	Sangat Rendah	5	Sangat Rendah
7	Pendidikan dan Pelatihan	1.611.000.000	264.288.110	100	Sangat Tinggi	17	Sangat Rendah
8	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-
9	Inspektorat	12.023.864.987	5.141.699.007	37	Sangat Rendah	29	Sangat Rendah
V	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	193.840.288.625	96.000.082.457	29	Sangat Rendah	50	Sangat Rendah
1	Sekretariat Daerah	75.545.996.227	33.083.319.593	15	Sangat Rendah	15	Sangat Rendah
2	Sekretariat DPRD	76.961.638.384	31.606.788.339	47	Sangat Rendah	24	Sangat Rendah
3	Urusan Bangsa dan Politik	41.332.654.014	31.309.974.525	26	Sangat Rendah	27	Sangat Rendah
VI	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	83.027.219.108	38.800.966.924	44	Sangat Rendah	47	Sangat Rendah
1	Kecamatan	83.027.219.108	38.800.966.924	44	Sangat Rendah	38	Sangat Rendah
VII	NON URUSAN	-	-	0	Sangat Rendah	0	Sangat Rendah
1	Non Urusan	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024, diolah.



Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat capaian rata-rata realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dirinci pada setiap urusan menunjukkan hasil **Sangat Rendah**. Apabila diklasifikasikan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja urusan yang sangat rendah ini dipengaruhi oleh pencapaian dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak merata pencapaiannya pada setiap urusan yang diampu oleh setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka.

2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada di bawah ini.

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri;
2. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
3. Tolok ukur dan target pada hasil program, keluaran kegiatan, dan hasil kegiatan dalam indikator kinerja belum konsisten;
4. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih ditemukan adanya Perangkat Daerah yang mencantumkan faktor pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak secara mendetail atau masih bersifat umum;
5. Terdapat beberapa kegiatan yang indikatornya tidak sesuai sehingga capaian indikator tidak dapat terukur.



Berdasarkan identifikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel di atas, terdapat permasalahan pembangunan Kabupaten Majalengka sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, yaitu:

1. Kapasitas SDM yang tersedia belum mampu mendukung sepenuhnya kegiatan yang direncanakan.
2. Koordinasi dan sinergitas antar stakeholders belum terjalin dengan maksimal.
3. Terjadi kesalahan rekening/nomenklatur kegiatan sehingga harus menunggu Perubahan APBD.
4. Terdapat kegiatan yang menunggu petunjuk teknisnya dalam rangka realisasi.
5. Kurangnya sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran.

2.3 Rekomendasi

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap RKPD Tahun 2024 untuk direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Perangkat Daerah dapat meningkatkan realisasi kinerja dan anggaran dalam program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dengan melakukan berbagai macam terobosan atau langkah-langkah strategis dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan atau K/L yang bersangkutan terutama yang berkaitan dengan juknis, mengingat masih adanya Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 capaian kinerja dan anggaran seluruh program masih di bawah 50% atau Sangat Rendah (SR);
2. Seluruh Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah masing-masing dalam rangka memastikan kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD 2024-2026; serta memberikan fasilitasi dan pendampingan secara khusus dalam penyusunan hasil evaluasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga ada konsistensi antar dokumen perencanaan.
3. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka harus lebih fokus pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sehingga ada percepatan capaian prioritas pembangunan.



4. Kepala Perangkat Daerah agar memudahkan atau mengupayakan percepatan dalam layanan administrasi atau proses pencairan dana/keuangan mengingat kelambatan penyerapan alokasi anggaran akan berdampak pada keterlambatan pada proses pembangunan dan layanan kepada masyarakat dan tidak menumpuk diakhir tahun.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana riil yang dialokasikan turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Hakikat yang penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak *an sich* yang artinya bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh aspek yang menjadi pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek-aspek pendorong tersebut contohnya seperti ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang yang digelutinya, infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan.

Pada bab ini memuat substansi yang memiliki keterkaitan yang jelas dengan bab-bab berikutnya dalam mengimplementasikan program dan kegiatan serta pencapaian berbagai indikator kinerja capaian tahun 2024 yang harus terpenuhi.

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Majalengka Tahun 2023, dan Triwulan 2 Tahun 2024

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2023, awal tahun 2024 menggambarkan perkembangan kinerja indikator ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

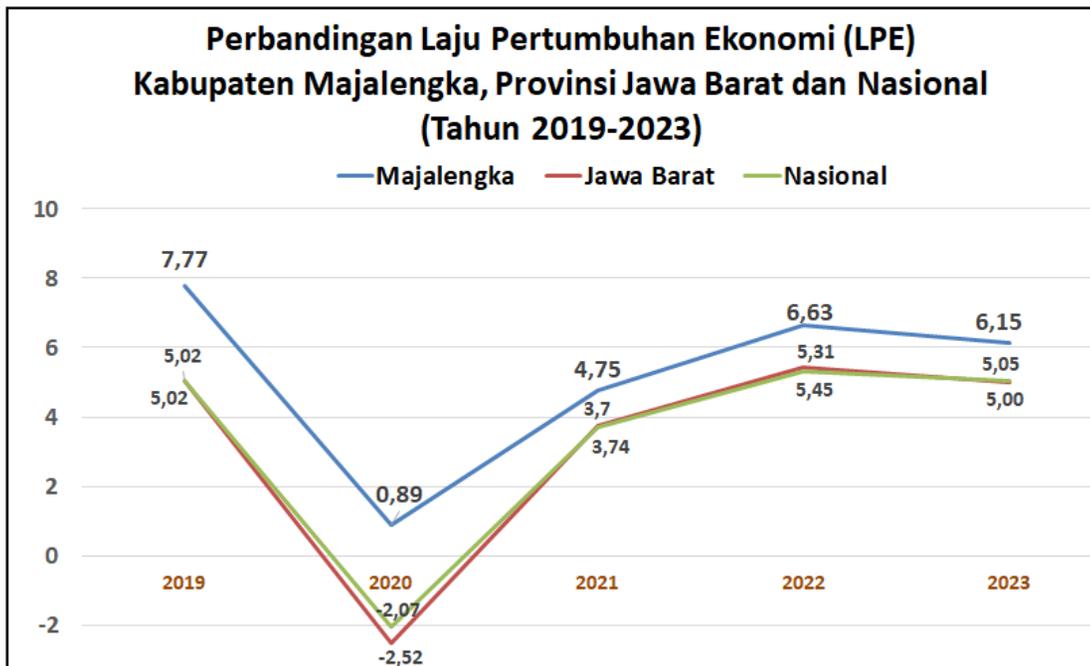
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan berakhirnya Pandemi Covid-19 terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% sedikit melambat dibanding tahun 2022 sebesar 6,63%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2023 merupakan LPE tertinggi kedua diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE tertinggi pertama adalah Kabupaten Indramayu (9,76%) dan urutan ketiga adalah Kota Tasikmalaya (5,96%), sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,00%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dari menurunnya laju pertumbuhan sektor pertanian yaitu menurunnya produksi padi tahun 2023 dibandingkan produksi padi tahun 2022 sebesar 4,00%.

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,57%; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,95% serta lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi sebesar 13,54%. Kontribusi ketiga lapangan usaha ini mendominasi perekonomian Majalengka sekitar 60,00%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu tumbuh sebesar 24,00%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 10,84%), lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 10,83%), serta lapangan usaha Jasa lainnya (tumbuh 10,05%), sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, lapangan

usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10%, 8,50%, dan 8,46%.

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional



Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024.

3.1.1.2 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sampai dengan tahun 2023 nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang

dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon. Baru mulai tahun 2024 ada penambahan 3 Kabupaten yang dihitung nilai inflasinya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, sehingga di Provinsi Jawa Barat ada 10 Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya

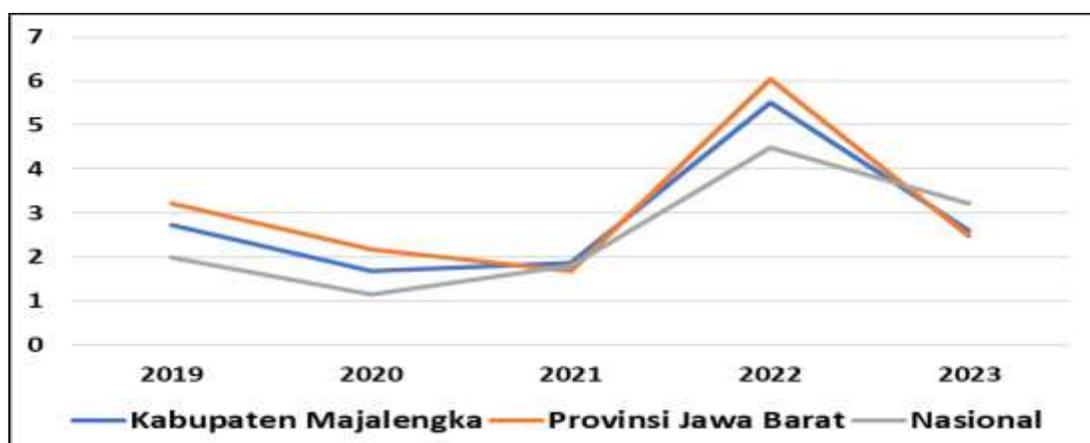
Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 dilaksanakan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Dan pada tahun 2024, BPS Kabupaten Majalengka mulai menghitung dan mengeluarkan nilai Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024.

Tabel 3.1
Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022

No.	Wilayah	Inflasi Tahunan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2.72	1.68	1.87	5.51	2.61
2	Jawa Barat	3.21	2.18	1.69	6.04	2.48
3	Kota Cirebon	2	1.16	1.81	4.48	3.22

Sumber: BPS Kota Cirebon, Tahun 2024.

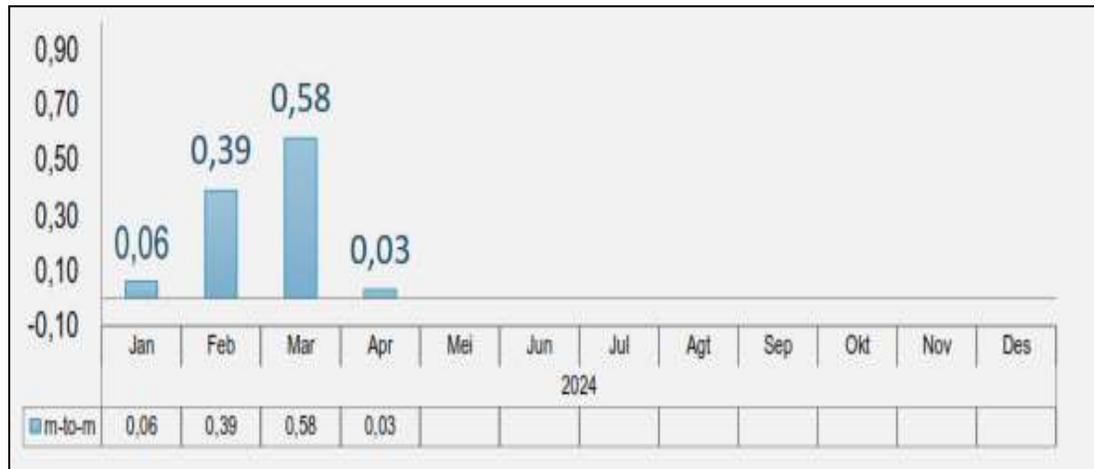
Gambar 3.2
Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan dihitung nilai inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai inflasi Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan April 2024 sebesar 0,03%.

Gambar 3.3
Inflasi Kabupaten Majalengka
Sampai Dengan Bulan April Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 68,20%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 68 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan

kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 4,12% menurun sebesar 0,04% dari tahun 2022 sebesar 4,16%. Dari 3 lapangan pekerjaan utama yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa, sektor jasa berkontribusi sekitar 47,00%, manufaktur sebesar 29,66% dan pertanian sebesar 22,55% pada tahun 2023. Sektor jasa cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 46,65%, tahun 2022 sebesar 48,70% dan tahun 2023 sebesar 47,00%. Dari tingkat pendidikan, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan atau tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 48,06%.

Tabel 3.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional

No.	Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kabupaten Majalengka	4,37	5,48	5,71	4,16	4,12
2.	Jawa Barat	7,99	7,69	9,82	8,31	7,44
3.	Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2024.

3.1.1.4 Gini Ratio

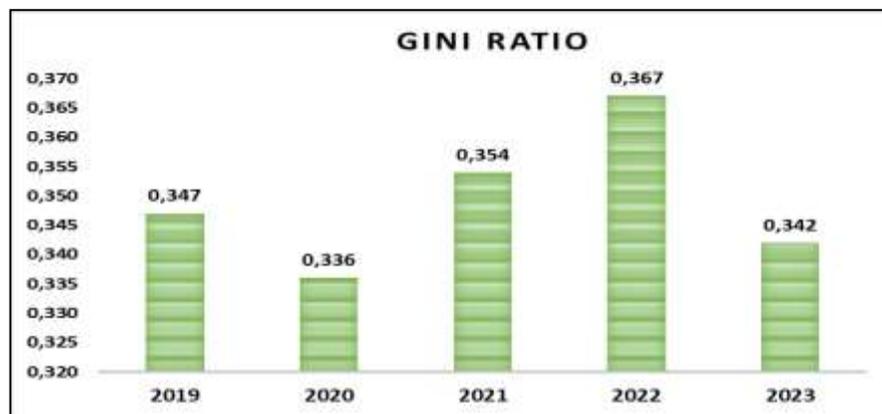
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;

- $0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- $\text{Gini Ratio} > 0,5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 masih tergolong sedang (0,342). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,425) dan Nasional (0,388) walaupun masih dalam kategori sedang.

Gambar 3.4
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Gini Ratio				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	0,347	0,336	0,354	0,367	0,342
Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
Nasional	0,380	0,381	0,381	0,381	0,388

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang Tahun 2024.

3.1.1.5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama kurun waktu 2018-2023, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinan Kabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43, tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, tahun 2022 turun menjadi 11,94% dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 11,21%. Angka ini masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat (7,62%) dan Nasional (9,36%).

Tabel 3.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	121.060	138.200	151.100	147.120	138.700
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21

Sumber: BPS Kab. Majalengka, Tahun 2024.

3.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2024

A. Tantangan Ekonomi Global

Di permulaan tahun 2024, ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian global:

1. Ketidakpastian Geopolitik. Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi.
2. Perubahan Nilai Mata Uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional.
3. Fluktuasi Harga Komoditas. Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu

Dalam laporan *Global Economic Prospects*, Bank Dunia mengungkapkan posisi kegentingan itu masih disebabkan berlarutnya efek pandemi, ditambah tak kunjung berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, Konflik Gaza hingga pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara demi meredam tekanan inflasi. Untuk proyeksi terbaru, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 2,7%.

B. Tantang Ekonomi Nasional

Dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang *pruden* namun tetap suportif dalam penguatan pondasi ekonomi. Di tahun 2022, defisit fiskal Indonesia telah kembali ke level di bawah 3% terhadap PDB, satu tahun lebih cepat dibanding rencana awal, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dan kredibilitas di tengah peningkatan risiko global. Meski demikian, APBN masih tetap memberi perhatian utama pada area-area vital seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal, serta reformasi birokrasi. Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,9% pada 2024.

Beberapa tantangan ekonomi Indonesia yang menjadi fokus utama pada tahun tahun 2024 diantaranya:

1. Ketahanan Ekonomi Terhadap Ketidakpastian Global: Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian global yang mencakup fluktuasi harga komoditas, ketegangan perdagangan, dan volatilitas pasar keuangan global, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik.
2. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi: meskipun Indonesia telah mengatasi sebagian besar dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, tantangan pemulihan ekonomi tetap ada, terutama dalam mengembalikan tingkat pertumbuhan yang kuat dan mengurangi tingkat pengangguran.
3. Peningkatan Investasi dan Infrastruktur: investasi dalam infrastruktur tetap menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, tantangan terkait dengan pendanaan, regulasi, dan peningkatan produktivitas infrastruktur masih perlu diatasi.
4. Inflasi dan Stabilitas Harga: mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga stabilitas harga tetap menjadi tantangan, terutama di tengah meningkatnya harga komoditas dan tekanan harga konsumen yang mungkin timbul dari pemulihan ekonomi.
5. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: peningkatan kualitas

dan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan terkait dengan penyelarasan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kurikulum pendidikan masih perlu diatasi.

6. Keseimbangan Fiskal: mengelola keseimbangan fiskal antara meningkatkan belanja publik untuk pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan menjadi tantangan, terutama mengingat tekanan dari utang publik yang meningkat.
7. Ketahanan Pangan dan Energi: Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui diversifikasi produksi, peningkatan produktivitas, dan investasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi harga.
8. Peningkatan Akses Keuangan: memperluas akses keuangan bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang terpencil, masih menjadi tantangan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan layanan keuangan digital dan infrastruktur yang lebih luas.
9. Perlindungan Lingkungan: tantangan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim memerlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sambil mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Reformasi Struktural: Indonesia perlu melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan iklim investasi, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, seperti manufaktur dan ekonomi digital.

C. Tantang Ekonomi Kabupaten Majalengka

Kondisi perekonomian Majalengka ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi setelah selesainya kasus pandemi Covid-19 yaitu pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata yang mulai menggeliat kembali. Tantangan perekonomian yang dihadapi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 meliputi:

1. Penormalan perekonomian ditengah ketidakpastian perekonomian global;

2. Akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Majalengka;
3. Kinerja Pertumbuhan perekonomian Majalengka kembali mencapai angka di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
4. Penyelenggaraan Pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi setelah beroperasionalnya Tol Cisumdawu dan beroperasionalnya kembali Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati.
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Mendorong Penerapan EIP (*Eco-Industrial Park*) pada kawasan industri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
 - b. Pengembangan pendidikan vokasi yang *link and match* dengan industri.
 - c. Kemitraan industri besar dan IKM.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memantapkan ekosistem digital UMKM.
 - b. Meningkatkan *Brand Awareness* produk UMKM melalui pemanfaatan platform digital.
 - c. mengoptimalkan ruang publik yang telah dibangun yang dilengkapi dengan tempat usaha.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Peningkatan Kualitas SDM pariwisata.
 - b. Peningkatan peran serta dan komitmen berbagai pihak dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.
 - c. Percepatan Sertifikasi CHSE.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Stabilisasi ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok;
 - b. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

6. Tantangan pada sektor pangan:
 - a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
 - b. Perlindungan harga di tingkat produsen;
 - c. Ketahanan pangan menghadapi dampak Badai La Nina.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Majalengka.

Secara umum sektor perdagangan pada tahun 2023 telah membaik. Pembangunan infrastruktur padat karya pada tahun 2023 diharapkan dapat dilaksanakan. Beroperasinya objek wisata, hotel, restoran dengan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability* (CHSE) turut menunjang pergerakan roda ekonomi. UMKM lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*ecommerce*).

Secara umum, perekonomian pada tahun 2024 akan lebih baik daripada tahun 2023, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2024 akan sama atau lebih besar dari 6 persen. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2024, perekonomian sudah mulai pulih dan semakin mendekati kondisi seperti di tahun 2019. Proyeksi perekonomian Kabupaten Majalengka tahun 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Target Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target	
			Murni	Perubahan
1.	Nilai PDRB-ADHK (triliun rupiah)	24.227	23.325	24.400
2.	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,12	4,44	4,10

4.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,21	10,56	10,56
5.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	31,115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2023. Proyeksi PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Sektor	Realisasi 2023	Proyeksi	
			2024	2025
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	3,22	3,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	-1,87	-0,87	-0,88
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> (Residual)	8,50	9,89	10,20
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,83	10,25	10,77
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,10	4,79	4,87
6.	Konstruksi	5,21	5,79	5,71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78	3,93	4,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	24,00	8,62	8,38
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,84	4,89	4,98
10.	Informasi dan Komunikasi	4,78	5,66	5,57
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	3,80	3,87
12.	Real Estat	5,45	6,28	6,09
13.	Jasa Perusahaan	8,46	5,11	4,91
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62	3,19	3,24
15.	Jasa Pendidikan	6,18	5,05	5,14
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,72	5,57	4,64
17.	Jasa lainnya	10,05	5,04	4,95
PDRB		6,15	6,72	6,28

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi	
			Murni	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	69,13	68,90	69,75
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,12	4,44	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,21	10,56	10,56
5.	Indek Gini (Poin)	0,342	0,329	0,335
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,24 (bps 0,97)	1,20	1,20
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	31,115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Proses pembangunan yang terjadi di daerah sangat diupayakan untuk bersinergi dengan pembangunan nasional supaya terjadi sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Ada 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan oleh Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan; 5) Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia diimplementasikan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan Infrastruktur, lebih fokus bagi terciptanya usaha melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan regulasi, menitikberatkan pada upaya menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi merupakan langkah-langkah konkrit dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi, sebagai upaya pemerintah pusat dengan *highlight*-nya melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya, diselaraskan dalam Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tema Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arah kebijakan adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
2. Peningkatan Kualitas SDM.
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai dengan peningkatan *Decent Job*.
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan iklim).
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tabel 3.8
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Target 2024
1.	Indeks Modal Manusia (IPM) (Poin)	73,55	73,99-74,02
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,05	5,3-5,7
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,36	6,5-7,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,388	0,374-0,377
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	34,09	27,27

Sumber: RKP Tahun 2024.

3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Selain dukungan kebijakan ekonomi secara nasional dari Pemerintah Pusat, kontribusi dari kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dalam menghadapi pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya Pencegahan, Penanganan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak pandemi baik pada aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial melalui Reformasi Sistem Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Penanganan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) *Rescue* atau penyelamatan; 2) *Recovery* atau pemulihan; dan 3) Penormalan. Tahapan *rescue* atau penyelamatan difokuskan pada

penyelamatan tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menyelamatkan terutama UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, tahapan *recovery* atau pemulihan difokuskan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, relaksasi pembiayaan usaha, mempermudah dan mempromosikan investasi serta mendorong sektor-sektor ekonomi untuk berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan tahapan penormalan berfokus pada kelanjutan program pemulihan ekonomi dari seluruh sektor ekonomi secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui KPBU, obligasi daerah, pinjaman daerah dan sumber pendanaan lainnya.

Sektor-sektor perekonomian yang menjadi prioritas untuk ditangani antara lain:

1. *Pemulihan Industri*

Industri merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat sekaligus memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB dan pertumbuhan industri nasional. Selain itu, Jawa Barat dikenal sebagai “rumah” bagi industri-industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri di Provinsi Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan yang berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengangguran akibat dari penutupan aktivitas industri (karyawan yang di PHK dan dirumahkan). Strategi pemulihan ekonomi pada sektor perindustrian meliputi: 1) Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 2) Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru; dan 4) Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana dan prasarana logistik.

2. Pemulihan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan *social distancing/physical distancing* saat pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh, yang antara lain adalah perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang berbasis *cleanliness* (kebersihan), *health* (kesehatan), *safety* (keamanan) dan *environment sustainability* (kelestarian lingkungan) atau dikenal dengan CHSE. Usaha pariwisata yang mengalami kesulitan permodalan akibat dampak pandemi Covid-19 akan diberikan bantuan permodalan melalui mitra pemerintah daerah. Pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi Jawa Barat dengan arah kebijakan melaksanakan program terkait pariwisata yang dapat menyerap tenaga kerja, membangun dan membangkitkan kembali usaha pariwisata terdampak pandemi Covid-19. Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; Peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan pariwisata.

3. Pemulihan Investasi

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara tepat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan

ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 antara lain dengan: 1) Realisasi “investasi baru” di Provinsi Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); dan 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

4. Reformasi Sistem Pangan Berkelanjutan

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pangan dan pertanian relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, namun tetap ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpurnanya permintaan. Oleh karena itu tetap diperlukan upaya-upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sistem pangan berkelanjutan yang terdiri dari aspek:

a) Ketersediaan Pangan

Dilakukan dengan cara memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri melalui klaster pertanian, mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor), dan penyediaan cadangan pangan. Kegiatan tersebut tertuang dalam Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program di atas adalah (1) memastikan *intake* air di daerah persawahan, salah satunya melalui pemantapan jaringan irigasi di sentra produksi; (2) menyediakan benih/bibit unggul; (3) pengawasan peredaran dalam pendistribusian pupuk; (4) melakukan percepatan musim tanam; (5) implementasi *smart agriculture* dalam proses produksi, dengan menerapkan digitalisasi pertanian, penggunaan *transplanter indo combine harvester*, mesin pemilah bibit unggul, alat pengering, instalasi pengolah limbah, modifikasi alsintan sesuai kebutuhan, penggunaan *smart fishing*, *smart feeder*; (5) peningkatan kompetensi penyuluh, *skill up* petani, pembentukan petani milenial; (6) Pengembangan *urban farming*; dan (7) *contract farming*, fasilitasi

dalam kemudahan akses modal dengan perbankan serta pemberian stimulus bagi petani dan nelayan dalam bentuk pembiayaan dasar.

b) Akses Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, menyederhanakan sistem logistik dan distribusi, meningkatkan akses petani terhadap pasar, menyediakan infrastruktur seperti akses jalan dan gudang penyimpanan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dari program pembangunan tersebut adalah pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP), pembangunan simpul pangan termasuk mendukung program pembangunan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan pemantapan akses jalan ke sentra produksi.

c) Pemanfaatan Pangan

Dilakukan dengan cara menjaga kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Kegiatan tersebut tertuang di dalam Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera. Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi makanan Bergizi Beragam Sehat dan Aman (B2SA), pemanfaatan bahan pangan lokal, pelatihan pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan skala rumah tangga dan juga pemberian suplemen gizi bagi remaja putri.

d) Peningkatan Sistem Informasi Pangan

Dilakukan dengan cara membangun sistem satu data yang dapat menghimpun data pangan di Provinsi Jawa Barat. Aktivitas ini dilakukan melalui pembentukan unit sebagai pusat pemelihara keberlanjutan dan integritas data serta keberlangsungan sistem, agar

bisa dengan mudah digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai landasan untuk mengaplikasikan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengedepankan pelaksanaan KUKM dengan ditopang oleh berbagai urusan yang sifatnya penunjang seperti urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal serta urusan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian. Adapun fokus fokus pembangunan tersebut diarahkan pada: (a) Peningkatan kemandirian Jawa Barat dalam sektor pertanian, kelautan dan perikanan, untuk pencapaian kedaulatan pangan; (b) Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian; (c) Peningkatan iklim kualitas usaha yang mendorong terciptanya investasi yang berdampak positif pada perekonomian. Adapun langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diupayakan untuk ditempuh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi diantaranya melalui petani juara, nelayan juara, industri juara, pasar juara, logistik juara, dan UMKM juara.

Kebijakan untuk mendukung perekonomian Jawa Barat terdapat pula di prioritas lainnya, yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Konsep yang dikembangkan pada prioritas ini yaitu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional (khususnya diluar wilayah aglomerasi ekonomi) sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata. Pelaksanaannya diaktualisasikan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata. Langkah-langkahnya diimplementasikan melalui perwujudan pariwisata juara dan ekonomi kreatif juara.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, terdapat prioritas Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah). Aplikasi dari kebijakan ini berupa pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rutilahu, beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu, dan buruh juara.

Tabel 3.9
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi	Target	
		2023	2024	2025
1.	Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.953	2.853	2.990
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,57	4,75	4,87
3.	Inflasi (persen)	2,48	1,5-3,5	1,5-3,5
4.	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	48,32	51	61,57
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,44	7,41-7,16	7,25
6.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,62	7,48-7,03	7,13
7.	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	162	600	839

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.1.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan diwarnai juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya

lips service. Diharapkan pula baik pada proses dan *outcome* dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai *polar* baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang.

Dalam rangka mengejar target kinerja dalam RPD, upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan aktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi daerah, diantaranya pariwisata, pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek sehingga mampu kembali menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Terkait hal tersebut maka strategi pada fase penormalan dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Kebudayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan dengan cara penataan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, peningkatan kapasitas sumberdaya pelaku usaha, peningkatan kualitas infrastruktur pendukung (pengerasan jalan, pembangunan TPT, PJU, sarana kebersihan) dan pembangunan kelembagaan.

2. Sektor Pertanian

Peningkatan Produksi Pertanian melalui Pengembangan prasarana dan sarana dan Pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan.

3. Sektor Pangan

Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Kualitas Konsumsi Pangan melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Aksesibilitas Pangan dan menjaga stabilitas harga

4. Sektor Koperasi dan UKM

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi, penciptaan dan pemberdayaan koperasi

dan UKM, pembangunan infrastruktur, promosi, pemasaran dan digitalisasi produk, produksi perikanan dan kelautan.

5. Sektor Industri

Percepatan Pertumbuhan Daya Saing Industri dan Perdagangan melalui pengembangan kawasan, pembangunan infrastruktur, kelembagaan pengelolaan kawasan industri, pengembangan SDM dan pengawasan

6. Sektor Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha dengan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui pemberdayaan fakir miskin, padat karya, pelatihan keterampilan, fasilitasi manajemen usaha dan pembangunan rumah informasi tenaga kerja.

7. Investasi

Peningkatan Realisasi Investasi melalui pembangunan infrastruktur (Mall Pelayanan Publik), promosi potensi daerah, peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas SDM.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Majalengka diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2024. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Majalengka dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Proyeksi Indikator Pembangunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi	
			Murni	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	69,13	68,90	69,75
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,12	4,44	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,21	10,56	10,56
5.	Indek Gini (Poin)	0,342	0,329	0,335
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,24	1,20	1,20

No.	Indikator	Realisasi 2023	Proyeksi	
			Murni	Perubahan
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	31.115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi

- pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Sampai dengan akhir Bulan Juni 2024 Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mengambil langkah strategis antara lain dengan melakukan pergeseran anggaran belanja tahun 2024, terakhir melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Pergeseran-pergeseran tersebut dilakukan karena:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan

Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Perangkat Daerah.
3. Penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam rangka perubahan DAK dan DBH-CHT di Perangkat Daerah.
4. Penyesuaian-penyesuaian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Hibah, dan Belanja Modal, serta Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan kondisi tersebut kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 terdiri dari kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

3.2.1 Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
5. Menyebarkan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak

- pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meningkatkan Dana Transfer yang tidak terikat.

Berdasarkan hasil di atas dan hasil analisis terhadap potensi pendapatan maka target pendapatan daerah tahun 2024 mengalami penyesuaian dan perubahan pada struktur pendapatan daerah maka target Pendapatan Daerah pada perubahan tahun 2024 dituangkan dalam tabel 3.11. Pada tabel tersebut terlihat terjadi pergeseran sebanyak 2 (dua) kali, secara umum Pendapatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 115.339.071.314 yang berasal dari Dana Transfer Antar Daerah dan peluang tambahan pendapatan dari dana kurang salur dari Pemerintah Pusat.



Tabel 3.11
Target Pendapatan Daerah pada RKPD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Uraian	Target				
	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran 1APBD 2024	Pergeseran 2 APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
PENDAPATAN	3.036.147.022.404	3.036.147.022.404	3.151.486.093.718	3.151.486.093.718	3.151.486.093.718
Pendapatan Asli Daerah	584.266.775.248	584.266.775.248	584.266.775.248	584.266.775.248	584.266.775.248
Pajak Daerah	184.802.274.949	187.802.274.949	184.802.274.949	184.802.274.949	184.802.274.949
Retribusi Daerah	311.384.007.444	311.384.007.444	311.384.007.444	311.384.007.444	311.384.007.444
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.353.516.206	9.353.516.206	9.353.516.206	9.353.516.206	9.353.516.206
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	78.726.976.649	78.726.976.649	78.726.976.649	78.726.976.649	78.726.976.649
Pendapatan Transfer	2.451.880.247.156	2.451.880.247.156	2.567.219.318.470	2.567.219.318.470	2.567.219.318.470
Transfer Pemerintah Pusat	2.245.198.374.000	2.254.198.374.000	2.254.198.374.000	2.254.198.374.000	2.254.198.374.000
Transfer Antar Daerah	197.681.873.156	197.681.873.156	313.020.944.470	313.020.944.470	313.020.944.470
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan SIPD RI Tahun 2024.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Berpijak pada kondisi pembangunan dan masyarakat Majalengka saat ini serta belajar dari dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Majalengka harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian antara pariwisata, pertanian, dan industri. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini akan sangat membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dalam implementasinya benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Majalengka.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, utamanya guna mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2024 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi belanja dalam APBD terbagi atas 2 klasifikasi dalam penganggarnya yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah

Yaitu kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Penunjang



Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

2) Program Dalam Rangka Melaksanakan Urusan Sesuai Dengan Bidang Urusannya.

Pada Program ini terdapat kegiatan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Bidang urusan tersebut terdiri atas:

- a. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Urusan pilihan;
- d. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e. Unsur penunjang urusan pemerintah;
- f. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- g. Unsur kewilayahan; dan
- h. Unsur pemerintahan umum.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan operasional;
2. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkau melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
5. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program



- dasar, program, regular, program prioritas daerah dan program prioritas;
6. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
 7. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Kabupaten Majalengka secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
 8. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 9. Penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 10. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
 11. Pemenuhan anggaran untuk dukungan kelancaran proses dan pelaksanaan Pemilu;
 12. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Pada proses penganggaran, penyesuaian belanja dan target kinerja dimungkinkan dan perlu dilakukan sepanjang seluruh upaya Pemerintah Daerah dalam realisasinya tidak sesuai dengan proyeksi.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah



pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.218.712.479.805. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.12.



Tabel 3.12
Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Uraian	Target				
	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran 1 APBD 2024	Pergeseran 2 APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
BELANJA	3.049.947.022.404	3.049.947.022.404	3.165.286.093.718	3.165.286.093.718	3.218.712.479.805
BELANJA OPERASI	2.224.321.916.799	2.224.321.916.799	2.275.729.377.423	2.273.877.085.023	2.327.074.220.990
Belanja Pegawai	1.314.413.359.432	1.314.413.359.432	1.308.387.589.671	1.305.278.277.771	1.351.574.663.958
Belanja Barang dan Jasa	820.298.174.367	820.298.174.367	878.477.374.752	879.894.394.252	885.995.144.032
Belanja Hibah	85.750.383.000	85.750.383.000	85.004.413.000	84.804.413.000	85.304.413.000
Belanja Bantuan Sosial	3.860.000.000	3.860.000.000	3.860.000.000	3.900.000.000	4.200.000.000
BELANJA MODAL	341.900.881.179	341.900.881.179	408.107.941.869	410.183.474.269	410.412.724.389
Belanja Tanah	1.000.112.586	1.000.112.586	1.000.112.586	1.000.164.986	1.000.164.986
Belanja Peralatan dan Mesin	88.745.204.978	88.745.204.978	122.400.549.521	123.536.029.521	123.765.279.641
Belanja Gedung dan Bangunan	125.342.023.450	125.342.023.450	128.642.023.450	128.582.023.450	128.582.023.450
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.874.505.000	112.874.505.000	142.527.724.930	143.527.724.930	143.527.724.930
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.964.035.165	12.964.035.165	12.462.531.382	12.462.531.382	12.462.531.382
Belanja Aset Lainnya	975.000.000	975.000.000	1.075.000.000	1.075.000.000	1.075.000.000
BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	7.724.550.000	7.501.310.000	7.501.310.000
Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	7.724.550.000	7.501.310.000	7.501.310.000
BELANJA TRANSFER	473.724.224.426	473.724.224.426	473.724.224.426	473.724.224.426	473.724.224.426
Belanja Bagi Hasil	20.110.256.448	20.110.256.448	20.110.256.448	20.110.256.448	20.110.256.448
Belanja Bantuan Keuangan	453.613.967.978	453.613.967.978	453.613.967.978	453.613.967.978	453.613.967.978

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SIPD RI Tahun 2024.



3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2024

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada perubahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Adapun Kebijakan penerimaan pembiayaan perubahan tahun 2024 meliputi:

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten;
2. Defisit APBD dapat ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah diluar efisiensi belanja dan dana kurang salur dari pemerintah pusat.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan perubahan tahun 2024 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyediaan dana pemilukada dan penyertaan modal BUMD.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran.

Apabila melihat SiLPA hasil perhitungan BPK (*audited*) terlihat naik namun sebenarnya jumlah tersebut merupakan akumulasi dari beberapa sumber dana terikat dan tidak terikat. Lebih jelasnya pada Tabel 3.13 disajikan proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan Tahun 2024.



Tabel 3.13
Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024

URAIAN	REALISASI				
	RKPD 2024	APBD 2024	Pergeseran 1 APBD 2024	Pergeseran 2 APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	28.800.000.000	28.800.000.000	28.800.000.000	60.096.386.187
Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000	28.800.000.000	28.800.000.000	28.800.000.000	60.096.386.187
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan					4.875.608.613
Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	4.875.608.613
PEMBIAYAAN NETTO	30.000.000.000	13.800.000.000	13.800.000.000	13.800.000.000	55.220.777.574

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan SIPD RI Tahun 2024.

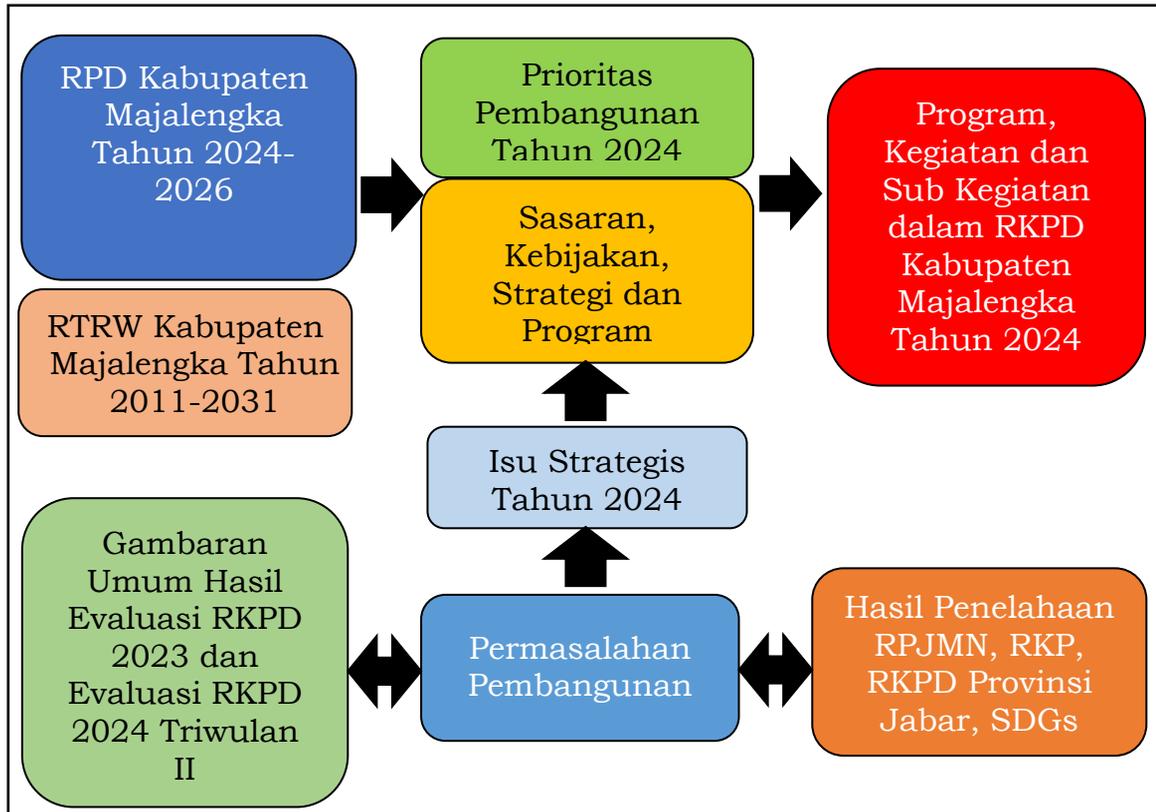
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 menggunakan *pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (Sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada perubahan RKPD Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 Triwulan II; (4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024



Sumber: Perumusan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: Pilar Pertama, Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua, Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga, Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar



Keempat, Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;



- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta



- e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a. Reformasi Kelembagaan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Berkualitas;
 - b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;



- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Majalengka ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi RPJMN, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Satu sasaran RPD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkungannya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Produktivitas Daerah; dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
2. Sasaran Nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”, didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Produktivitas Daerah; dan Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
3. Sasaran Nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”, tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka.
4. Sasaran Nasional 4: “Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Terwujudnya



Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima.

5. Sasaran Nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Penduduk Miskin.
6. Sasaran Nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Derajat Kesehatan.
7. Sasaran Nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pendidikan; dan Meningkatnya Derajat Kesehatan.
8. Sasaran Nasional 8: “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Menurunnya Penduduk Miskin.
9. Sasaran Nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Produktivitas Daerah.
10. Sasaran Nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
11. Sasaran Nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Mutu Pendidikan.
12. Sasaran Nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: Meningkatnya Kondusivitas Daerah.
13. Sasaran Nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”, didukung oleh sasaran Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Kondusivitas Daerah.
14. Sasaran Nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”, memiliki keterkaitan dengan



sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kondusivitas Daerah.

15. Sasaran Nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”, didukung oleh sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Mutu Pendidikan.
16. Sasaran Nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
17. Sasaran Nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
18. Sasaran Nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan”, tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka.
19. Sasaran Nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
20. Sasaran Nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang Berkelanjutan.
21. Sasaran Nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
22. Sasaran Nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu: Meningkatkan Kondusivitas Daerah.



23. Sasaran Nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
24. Sasaran Nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”, memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka yaitu: Meningkatnya Kondusivitas Daerah.

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2026. Adapun isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sampai dengan 2026 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2024 yaitu 73,56, sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 8,78 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,62 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi. Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada



tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2024 yaitu 7,39 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah relatif terbatas, ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas pada tahun 2022 baru mencapai 53,20 persen, dengan target tahun 2024 yaitu 57,00 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,670 poin, dengan target tahun 2024 yaitu 0,667 poin.

4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.



Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4 : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;



3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2024 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Tema Pembangunan Nasional tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah:

“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat”

Adapun tujuan dan sasaran pada dapat diuraikan dalam matriks, sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

No.	Tujuan & Sasaran	Indikator Tujuan & Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target			Kondisi Akhir
				Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Gini	Poin	0,367	0,342	0,329	0,328	0,328	0,328
		IPM	Poin	68,56	69,13	68,90	69,00	69,20	69,20
1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,94	11,21	10,56	10,09	9,63	9,63
1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,49	7,52	7,61	7,69	7,78	7,78
1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,09	71,05	71,35	71,70	79,50	79,50
		Prevalensi Stunting	Persen	24,30	24,10	17,36	14,61	14,75	14,75
2.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,63	6,15	6,72	6,28	6,34	6,34
		Inflasi	Persen	4,86	3,22	3,97	3,97	3,97	3,97
2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	65,18	67,28	68,49	68,49
2.2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,81	66,29	67,08	68,26	69,45	69,45
2.3.	Meningkatnya Produktivitas Daerah	Nilai PDRB (ADHB)	Trilyun Rupiah	28,44	31,11	31,58	29,31	31,17	31,17



		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,16	4,12	4,44	4,40	4,37	4,37
2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Kategori	N/A	N/A	C	C	B	B
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	N/A	N/A	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC	B	B	B
3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kab. Majalengka Tahun 2024-2026.



Tabel 4.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi 2024	
			Murni	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	69,13	68,90	69,75
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	6,15	6,72	6,10
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,12	4,44	4,10
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,21	10,56	10,56
5.	Indek Gini (Poin)	0,342	0,329	0,335
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,24	1,20	1,20
7.	Pendapatan Per Kapita (ADHB Juta Rupiah)	31,115	29.350	32.100

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Indikator Tujuan & Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	
			Murni	Perubahan
Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,21	10,56	10,56
RLS (rata-rata lama sekolah)	Tahun	7,52	7,61	7,61
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,05	71,35	71,35
Prevalensi Stunting	Persen	24,10	17,36	17,36
Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	65,18	65,18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,29	67,08	67,08
Nilai PDRB (ADHB)	Trilyun Rupiah	31,11	31,58	31,58
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,12	4,44	4,10
Indeks Tantribum	Kategori	N/A	C	C
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	CC
Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2024.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan



lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional Tahun 2024 ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN);
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.



B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2024

1. SN 1, Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatkan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatkan Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. SN 14, Meningkatkan Ketahanan Keluarga untuk Memperkuat Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatkan Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;



17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta
25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Tabel 4.4
Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No.	Indikator	Target 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,99-74,02
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3-5,7
3.	Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,5-7,5
5.	Indek Gini (Poin)	0,374-0,377
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	27,27

Sumber: RKP 2024.

4.2.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 untuk tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024

Indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Indikator Pembangunan	Target 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,42
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,01
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,68
4.	Rasio Gini (nilai)	0,408
5.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,56
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,42
7.	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	57,28

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

4.2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Majalengka telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka serta telah ditelaah maupun diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka. Saran dan masukan DPRD



menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain.

A. Permasalahan Kesehatan

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan puskesmas dan peningkatan posyandu dan posbindu di beberapa daerah;
2. Pembangunan sarana Olahraga selain untuk kepentingan kesehatan juga untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga terutama kaum muda.

B. Permasalahan Pendidikan

1. Untuk kondusifitas, keamanan dan kenyamanan Siswa harus dilakukan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan (SD,SMP,MI, MTS);
2. Peningkatan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.

C. Permasalahan sosial dan keagamaan

1. Diperlukan bantuan sosial untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Banyak sarana keagamaan yang mulai rusak yang memerlukan rehabilitasi segera untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah;
3. Fasilitasi sarana prasarana pendukung seperti tempat wudhu, sound sistem, AC, dan sarana lainnya untuk kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya.

D. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan

1. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di desa dengan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdagangan diantaranya pembangunan dan rehabilitasi pasar desa;
2. Pelatihan dan bantuan modal di sektor pertanian dan peternakan guna mendukung program kedaulatan pangan pemerintah;



3. Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang nantinya dapat digunakan dalam berwirausaha sehingga menambah unit usaha baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan sarana prasarana objek daya tarik wisata harus ditata baik objek wisata itu sendiri maupun sarana pendukungnya seperti jalan, tempat parkir, kios untuk meningkatkan kunjungan wisata;
5. Penguatan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, stimulus bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha;
6. Penguatan dukungan di bidang pertanian seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pengadaan alat-alat pertanian dan bibit dengan kualitas unggul secara tepat sasaran, jaringan irigasi pertanian, dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;
7. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan sehingga taraf hidup masyarakat meningkat;
8. Pengadaan bantuan untuk home industry berupa pelatihan, modal dan pemasaran.

E. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Peningkatan infrastruktur jalan, khususnya untuk akses pembelajaran, transportasi, wisata, distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti gedung olah raga, lapangan sepak bola dan gedung kesenian;
3. Pembangunan tembok penahan tanah (TPT)/ drainase utama;
4. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman;
5. Normalisasi dan pemeliharaan drainase;



6. Penataan Kawasan Kumuh;
7. Pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
8. Pengadaan sarana penerangan jalan umum bagi wilayah yang minim penerangan guna keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi tindak kriminal di wilayah tersebut;
9. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni;
10. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok;
11. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan seperti TPS Pengadaan armada pengangkut sampah.

4.2.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa dan perumusan permasalahan terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu: 1) Masih rendahnya pembangunan manusia; 2) Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; 3) Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum maksimal. Ketiga isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.	<i>Lokal:</i> Daya beli dan Pengangguran Pemerataan	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.2. Indeks Pembangunan Manusia belum mencapai target.3. Rendahnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah4. Rendahnya Akses pendidikan bagi masyarakat usia sekolah.5. Pendidikan gratis belum maksimal6. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs yang tidak sesuai usia sekolah (13-15 tahun)7. Sarana dan prasarana pendidikan belum maksimal8. Penyebaran sekolah yang belum merata9. Distribusi guru proporsional belum maksimal10. Rendahnya pemahaman orang tua dan siswa untuk melanjutkan Pendidikan11. Masih kurangnya infrastruktur penunjang Pendidikan12. Masih rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none">13. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan masyarakat14. Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.15. Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang terstandarisasi16. Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit- penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi17. Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat)18. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.19. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.20. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Majalengka yang memenuhi standar nasional	
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.2. Penanggulangan Pengangguran yang disertai Peningkatan <i>Decent Job</i>.	<p><i>Nasional:</i> Daya Beli</p> <p><i>Lokal:</i> - Daya Beli - Pengangguran - Pemerataan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase penduduk miskin masih belum mencapai target.2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi.3. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none">4. Belum Optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).5. Lapangan kerja terbatas.6. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja.7. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong “pekerja rentan/<i>vulnerable employment</i>” masih cukup tinggi.8. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.	
<ol style="list-style-type: none">1. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.2. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau).3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.	<p><i>Nasional:</i> Defisit Fiskal dan Investasi Rantai nilai Daya Beli</p> <p><i>Lokal:</i> Bencana Pemulihan Ekonomi</p>	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Majalengka belum optimal.2. Masih terdapat rumah yang tidak layak huni3. Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum4. Akses dan standardisasi terhadap layanan air minum belum merata.5. Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.6. Rendahnya kinerja jaringan jalan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas.7. Masih terdapat kondisi Jalan dalam keadaan rusak	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none">8. Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan Kabupaten belum optimal.9. Penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat.10. Jaringan irigasi masih banyak terdapat kerusakan.11. Cakupan pelayanan air limbah domestik belum optimal.12. Masih kurangnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya dan penanganan sampah masih terfokus pada penanganan timbunan sampah13. Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar.14. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal15. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal.16. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.	
<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong pemulihan dunia usaha.2. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.	<i>Nasional:</i> Investasi <i>Lokal:</i>	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Laju Pertumbuhan Ekonomi masih rendah.2. Pendapatan per kapita belum sesuai target.3. Skor Pola Pangan Harapan belum sesuai target.	Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Ekonomi Hijau).	Pemulihan Ekonomi		<ol style="list-style-type: none">4. Kontribusi lapangan usaha Pariwisata terhadap PDRB masih rendah.5. Pertumbuhan sektor industri masih bisa ditingkatkan lagi.6. Masih kurangnya sarana dan infrastruktur daerah terkait informasi peluang dan potensi usaha7. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi.8. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan.9. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.10. Masih terbatasnya sarana perdagangan/ distribusi karena fasilitas pasar pemerintah daerah kondisinya kurang memadai11. Belum optimalnya akses (konektivitas), amenities dan atraksi pada destinasi wisata.12. Belum tersalurnya secara efektif promosi wisata13. Kurang terawatnya sarana dan prasarana obyek wisata14. Belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian.15. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.16. Pemasaran hasil perikanan belum terintegrasi.17. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.	



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			18. Belum optimalnya rantai pasok pemasaran. 19. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.	
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan dan Pendidikan	<i>Global:</i> Investasi	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal	1. Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi. 2. Belum maksimalnya kesesuaian penyusunan dokumen dengan aturan yang ada 3. Masih ada Pejabat ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 4. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa. 5. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa. 6. Belum optimalnya Pemanfaatan CSR 7. Penerapan <i>e-Government</i> belum sepenuhnya dilaksanakan. 8. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral. 9. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>). 10. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Majalengka 11. Belum optimalnya kelengkapan data dan informasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu	Isu Strategis RPD Majalengka 2024-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Majalengka Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none">12. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat.13. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketentraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat.14. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.15. Mengurangi potensi konflik antar umat beragama.16. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka 2024.

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.6, maka 3 (tiga) isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 relevan dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,94 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 11,21 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. Kondisi saat ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.



2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi.

Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM



yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus

3. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini



lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari Pandemi Covid-19.

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata; 2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama; 3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; 4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; 5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; 6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pembangunan manusia 2. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 3. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia 3. Pembangunan insfratraktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah 4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2024, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024



Tabel 4.8

Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2024

Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
Penanggulangan Kemiskinan	PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
	PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	PN 1,Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar
	PN 6, Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim;

Prioritas Pembangunan Daerah RPD 2024-2026	Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PN 7,Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2024 dan Sasaran RKPD 2024 Kabupaten Majalengka

No	Sasaran RKP Tahun 2024	No	Sasaran RKPD Tahun 2024
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S2.	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah
S3.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	2.3.	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S4.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
S5.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin
		2.3	Meningkatnya Produktifitas Daerah
S6.	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan
		1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan
S7.	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1.3.	Meningkatnya derajat kesehatan
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	1.1.	Menurunnya Penduduk Miskin
S9.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	2.3	Meningkatnya Produktifitas Daerah
		3.2.	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah



No	Sasaran RKP Tahun 2024	No	Sasaran RKPD Tahun 2024
S10.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan
S11.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan
S12.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S13.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S14.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S15.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	1.2.	Meningkatnya kualitas pendidikan
S16.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S17.	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S18.	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S19.	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S20.	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan
S21.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2.2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
S22.	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S23.	Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline	2.2.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
S24.	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga, demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
		2.4.	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah
S25.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3.1.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Nilai PDRB
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Nilai PDRB
Rasio kewirausahaan nasional (%)	N/A
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	Nilai PDRB
Kontribusi PDB industri pengolahan ((%)	Nilai PDRB
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US\$ Miliar	Nilai PDRB
Kontribusi PDB pariwisata (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	N/A
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	N/A
Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	N/A
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	N/A
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	N/A
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	N/A
Konservasi Kawasan Kelautan (juta ha)	N/A
Produksi ikan (juta ton)	Nilai PDRB
Produksi garam (juta ton)	Nilai PDRB
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan wirausaha (%)	Nilai PDRB
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Nilai PDRB
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Niali PDRB
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	TPT
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	TPT
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Nilai PDRB
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Indeks RB
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Nilai PDRB
Neraca perdagangan (US\$ miliar)	N/A
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	Nilai PDRB
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	N/A
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Indeks RB
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Nilai PDRB
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	N/A
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	N/A
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	N/A
Perkembangan status pembangunan desa	N/A
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Persentase penduduk miskin
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	N/A
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	N/A
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	N/A
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks RB
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks RB
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Indeks RB
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Indeks RB
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Indeks RB
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks RB
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks RB
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Indeks RB

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Indeks RB
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Indeks RB
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	N/A
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	AHH
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Indeks RB
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Persentase penduduk miskin
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Persentase penduduk miskin
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Persentase penduduk miskin
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	RLS
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi stunting
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	AHH
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	AHH
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	AHH
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai)	RLS
Membaca (nilai) Sains Nilai)	RLS
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	RLS
Harapan lama sekolah (tahun)	RLS
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	N/A
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	TPT
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	N/A
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Persentase penduduk miskin
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Persentase penduduk miskin
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Persentase penduduk miskin
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	N/A
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	AHH
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	AHH
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	AHH
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Prevalensi stunting
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	AHH
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	AHH
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	AHH
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	AHH
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	AHH
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	AHH
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	AHH
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	AHH
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	AHH
Persentase obat memenuhi syarat (%)	AHH
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Persentase penduduk miskin

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Persentase penduduk miskin
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	RLS
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	RLS
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	RLS
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	RLS
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	RLS
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	TPT
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	N/A
Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	N/A
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	N/A
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	N/A
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	TPT
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Trantibum
Persentase pemuda berumur 16- 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	N/A
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	TPT
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Persentase penduduk miskin
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Persentase penduduk miskin
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pengetahuan
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Indeks Pengetahuan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi)	Nilai PDRB
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Niali PDRB
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	N/A
Budaya dan Prestasi Olahraga:	RLS
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	N/A
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Pengetahuan
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Indeks Trantibum
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	N/A

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	RLS
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	N/A
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	N/A
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	N/A
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	N/A
Rasio Elektrifikasi (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Persentase penduduk miskin
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Trantibum
Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	N/A
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	N/A
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	N/A
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	N/A
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	N/A
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	N/A
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	N/A
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Tingkat kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Indeks Gini
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A
Persentase penurunan emisi GRK (%)	N/A
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	N/A
Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	N/A
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	N/A
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks RB
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks RB
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks RB
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Indeks Trantibum

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perub. RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

Prioritas Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2024 yang berkolerasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.11

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka

PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Penanggulangan Kemiskinan	1.1. Menurunnya Penduduk miskin	Persentase Penduduk Miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi masyarakat miskin berbasis data P3KE	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin	Penguatan Ekonomi Keluarga Miskin Berbasis Data P3KE	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	DKP3
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DP3AKB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
Menangani Kantong-Kantong Kemiskinan	Pemenuhan Infrastruktur dan Mendekatkan Akses Keluarga Miskin	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM			
		Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	DPKPP			
Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan	RLS (rata-rata lama sekolah)	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Penurunan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
	1.3. Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	Meningkatkan Kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan aksesibilitas sarana kesehatan dan Kualitas SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES,RSUD CIDERES & MAJALENGKA



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Aktivitas Olah Raga	Peningkatan Aktivitas Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISPORA
		Prevalensi Stunting	Meningkatkan Intervensi Gizi Sensitif	Peningkatan Status Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
			Peningkatan Intervensi Gizi Spesifik	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Lingkungan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPKPP
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP3AKB
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	DISKOMINFO		



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	2.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan ruang wilayah yang berkelanjutan	tingkat kualitas infrastruktur daerah dan Ruang Wilayah	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Peningkatkan jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbangun serta pengawasan angkutan barang di Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
			Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan jalan kabupaten	Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten dan bangunan pelengkap	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi serta pengelolaan sumber daya air lainnya di Wilayah Kabupaten Majalengka	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya	Melaksanakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
			Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) serta melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	
	2.2. meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran air	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	
			Mengurangi pencemaran Udara	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Meningkatkan tutupan lahan	Pemeliharaan Tutupan Lahan	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		
		Persentase penanganan, Pengurangan sampah	Peningkatan pengelolaan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan			
	2.3. Meningkatnya produktivitas daerah	Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatkan Daya saing sumber daya Lokal	Meningkatkan	Peningkatan Jumlah IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DISPERDAGIN
					Peningkatan Kualitas Produk Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	DK2UKM
					Penguatan Ekosistem Digital	Program Pengembangan UMKM	
			Meningkatkan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISPERDAGIN	
				Peningkatan Volume dan Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor		
			Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Penguatan Pasar Digital (E-Commerce)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DKP3	
Penguatan Regulasi LP2B dan LSD				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian						
	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Litbang Pertanian (Benih / Bibit Unggul)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPARBUD				



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan Kualitas Destinasi Layak Kunjung	Peningkatan pengelolaan, promosi destinasi dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata	
				Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Program Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	
			Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Masyarakat Desa	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	DPMD
				Peningkatan pembangunan desa melalui pengembangan kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD
				Peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, lembaga desa dan aparatur desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
				Peningkatan Keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
				Meningkatkan Iklim Investasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DK2UKM
				penguatan sarana prasarana pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
				Penguatan Promosi Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Menumbuhkan minat sektor pertanian	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Meningkatkan keterampilan tambahan pada angkatan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKP3
				Peningkatan Minat Pelatihan Keterampilan Angkatan Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	2.4. Meningkatnya Konduktivitas Wilayah	Indeks Tantribum	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Layanan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATPOLPPDAMKAR
			Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan Budaya Tertib dan Sadar Aturan Dalam Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Koordinasi Kondusifitas dan Stabilitas Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana	peningkatan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.1. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SETDA
			Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
					Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
			Melaksanakan pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Pengelolaan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM					



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan ketersediaan regulasi daerah, kapasitas dan kapabelitas SDM penyelenggaraan statistik sektoral serta fasilitas dan asesibilitas media data berbasis teknologi informasi	Peningkatan pengelolaan statistik sektoral daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFO
			Meningkatkan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan pemerataan akses, kualitas pelayanan, keamanan dan keterbukaan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika	
			Meningkatkan tatakelola standar kemanan, sarana pendukung dan sumberdaya manusia pengelola informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penyusunan dan penetapan regulasi keamanan informasi daerah Peningkatan penyelenggaraan bimbingan teknik dan pelatihan sumberdaya manusia. Meningkatkan audit dan supervisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	



PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH					
				Penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pembangunan Desa/Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KECAMATAN					
					Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN					
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KECAMATAN					
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KECAMATAN					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappedalitbang					
						Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Level PK APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT		
									Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Diseminasi inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatkan ekosistem inovasi pelayanan publik	One Agency One Innovation	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SETDA					
						3.2. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta koordinasi dana transfer	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
										Program Pengelolaan barang milik daerah	BKAD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah											

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap masing-masing Kegiatan Prioritas pada prioritas nasional tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.12
Tingkat dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Masing-masing Kegiatan Prioritas
Pada Prioritas Nasional Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
1.	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT	Penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) melalui penyelesaian pembangunan PLT ET <i>on grid</i> yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 secara efisien dan efektif	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		
		Pembangunan PLT ET <i>off-grid</i> untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)			
		Peningkatan kualitas transmisi dan distribusi untuk mendukung pemanfaatan ET			
		Optimalisasi produksi biofuel disertai kebijakan demand management dalam negeri			
		Restrukturisasi subsidi energi fosil ke EBT secara bertahap			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Mendorong serta memfasilitasi peran Pemda dalam pengelolaan ET skala kecil			
2.	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Memelihara dan meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada DAS kritis serta perhutanan sosial	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		
		Menyelamatkan DAS dan danau prioritas nasional dalam rangka mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata			
		Meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan
		Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi secara partisipatif dan melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan
		Transformasi digital dalam praktik budi daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Regionalisasi sistem pangan yang berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase pemenuhan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan
		Pertanian regeneratif dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4.	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Penataan WPP yang didukung dengan kelembagaan yang memadai	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Terpenuhinya produksi perikanan tangkap
		Bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam			Terfasilitasinya sarana dan prasarana nelayan
					Terfasilitasinya penebaran benih ikan di perairan umum (Rawa, Situ, Sungai, Embung)



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1		Pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk klaster kawasan tambak udang dan bandeng, klaster tambak garam, kampung perikanan budi daya, kampung nelayan, serta desa wisata bahari			
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional, serta pusat produksi benih dan induk unggul	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah omset pemasaran produk perikanan
Perluasan akses pasar dan penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir	Jumlah omset pemasaran produk perikanan				



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>Penguatan kelembagaan usaha melalui pengembangan korporasi, fasilitasi akses pendanaan, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan</p> <p>Penguatan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan</p>			
5.	Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi	<p>Formalisasi bentuk usaha mikro</p> <p>Peningkatan nilai tambah produk</p> <p>Peningkatan kapasitas pelaku usaha</p> <p>Peningkatan partisipasi UMKM dalam GVC</p> <p>Kemudahan akses pembiayaan</p> <p>Perluasan akses pasar dan kemitraan usaha</p> <p>Pengembangan wirausaha tematik</p> <p>Integrasi program K/L dalam pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi</p> <p>Penguatan regulasi serta ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi</p>	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p>	<p>Jumlah UMKM mempunyai NIB</p> <p>Persentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri</p> <p>Persentase Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan</p>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
6.	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Akselerasi hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi dan harmonisasi kebijakan hulu hilir	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		
		Peningkatan tenaga kerja berkompotensi tinggi		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
		Peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		
		Pengembangan industri dan infrastruktur halal			
		Percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi			
		Penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Layak Kunjung
Penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Penguatan industri kreatif berbasis konten		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sertifikasi pelaku ekonomi kreatif
		Penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Usaha Skala Menengah dan Besar
		Penyempurnaan integrasi sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan Fasilitas Perizinan Usaha Industri
		Peningkatan investasi teknologi informasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular			
		Penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan perlindungan pekerja		Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
7.	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan TKDN,	Peningkatan dan percepatan diversifikasi, nilai tambah, dan teknologi tinggi produk ekspor barang dan jasa	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Peningkatan hilirisasi berbasis sumber daya alam dan komoditas			
		Optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor dengan menjamin ketersediaan di dalam negeri		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor
		Pendalaman dan perluasan pasar ekspor negara tradisional dan non tradisional			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Penguatan redesain program pelatihan ekspor dan optimalisasi sistem informasi perdagangan yang terintegrasi			
		Penguatan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i>			
		Penguatan diplomasi ekonomi dalam menghadapi hambatan non tarif dan mendorong keberterimaan negara lain terhadap standar barang dan jasa Indonesia			
		Mendorong kesiapan transisi perdagangan hijau melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan			
		Penguatan daya saing sektor jasa melalui harmonisasi regulasi sektor jasa dan penguatan ketersediaan data perdagangan jasa			
		Pemulihan pasar pariwisata yang didukung kebijakan visa yang kondusif, serta penyelenggaraan event, wisata olahraga, Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE), dan fasilitasi destinasi film		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Layak Kunjung



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif
		Penguatan ekspor gastronomi melalui “Indonesia Spice Up the World”			
		Perluasan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri termasuk melalui gerakan “Bangga Buatan Indonesia” dan “Bangga Berwisata di Indonesia Aja”			
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui <i>National Logistic Ecosystem</i> (NLE) yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		
		Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang pokok		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memerhatikan aspek risiko perlindungan konsumen		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tingkat Pengaduan Konsumen



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian			
		Penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku kepentingan terhadap pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau/antardaerah		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya pelayanan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		Penguatan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi logistik nasional			
		Redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat <i>multi-channel</i>		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tingkat Pengaduan Konsumen
		Perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi			
		Penerapan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau			
		Mengintegrasikan taksonomi hijau ke dalam peraturan perundang-undangan dan kelembagaan			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif			
		Perbaiki kualitas dan kinerja belanja TKD melalui sinergi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah serta penguatan pengawasan anggaran TKD			
		Pendalaman pasar keuangan yang kondusif utamanya pasar obligasi pemerintah yang melibatkan multi stakeholders pusat-daerah, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah			
		Penyediaan statistik ekonomi hijau	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
		Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial sesuai dengan standar dan metodologi Internasional di Indonesia, dengan didukung kerangka regulasi yang memadai			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi dan sinkronisasi penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia			
PN.02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					
1	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang Perumahan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum)	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		
		peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial
		penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase AKIP OPD yang dievaluasi dengan nilai BB
		peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		penataan dan harmonisasi regulasi		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi
		percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital), percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pelayanan Publik
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
1	Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan	peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah 3T, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Pendaftaran Penduduk	Capaian SKM Perangkat Daerah
		pemutakhiran data penduduk berdasarkan hasil <i>Long Form</i> Sensus Penduduk (SP) 2020			Cakupan kepemilikan KTP-el Cakupan Pelayanan Pindah-Datang Penduduk



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital			
		penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang meningkat Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
2	Reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	perluasan dan penguatan sosialisasi terpadu jaminan sosial untuk meningkatkan kepesertaan dan kolektabilitas, khususnya bagi pekerja informal pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, melalui mekanisme kolaboratif dan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan tidak mampu perluasan program dan manfaat jaminan sosial, mencakup return to work dan perlindungan hari tua pekerja informal	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat Perlindungan dan jaminan Sosial



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan menjadi Registrasi Sosial Ekonomi melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan secara berkala untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Data ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai data acuan dalam melakukan integrasi program-program perlindungan sosial dan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti			
		penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial			
		pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk program-program bantuan sosial			
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan	peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
	fokus antara lain	percepatan penurunan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
		pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama pada HIV/AIDS, tuberculosis (TB), Malaria, Kusta, dan Schistosomiasis			
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik FKTP pemerintah maupun swasta serta akreditasi Rumah Sakit			
		pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di puskesmas			
		pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional			
4	Pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional	peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD
		peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun			APM SD/MI
		kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah			APM SMP/MTs



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata			APK Non Formal
		penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan			
		peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan serta strategi peningkatan efektivitas pembiayaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan			
5	Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	peningkatan kualitas anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak
		peningkatan kualitas perempuan		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
		peningkatan kualitas pemuda		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kepeloporan pemuda
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
6	Mengentaskan kemiskinan	<p>peningkatan keberantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan</p> <p>peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial</p> <p>peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan NAPZA, penderita HIV/AIDS, korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan</p>	Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	<p>Jumlah UMKM mempunyai NIB</p> <p>Persentase usaha ultra mikro miskin yang mandiri</p>
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia		Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
		penyelarasan jenis program studi dan arah penelitian dengan kebutuhan pengembangan sektor prioritas di daerah			
		peningkatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan pengembangan kurikulum serta inovasi pembelajaran yang dapat memperkuat karakter, berorientasi pada kompetensi untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan dengan wawasan pengembangan wilayah			
		pemfokusan sumber daya riset dan inovasi untuk mencapai target flagship Prioritas Riset Nasional 2020-2024 dan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dengan berbasiskan iptekin		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan, Kajian dan Penelitian yang dihasilkan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi, khususnya melalui peningkatan kolaborasi antara lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat			Indeks Inovasi Daerah yang diraih
		perbaikan pembinaan olahraga		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
1	Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	<p>peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara</p> <p>penerapan nilai-nilai ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) untuk peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya</p> <p>penerapan disiplin, reward, dan punishment dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja</p>	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<p>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten Majalengka</p> <p>Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial</p>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1		penguatan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan untuk internalisasi nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
		penguatan pendampingan GNRM dan kerja sama multipihak/pentahelix dalam pelaksanaan kegiatan GNRM di daerah		Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	
		internalisasi prinsip dan nilai koperasi serta perbaikan citra koperasi pada generasi muda melalui penguatan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait koperasi kepada generasi muda		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif
		peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Menurunnya Median Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan
2	Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
		peningkatan kualitas tata kelola, serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	jumlah seni tradisional yang direvitalisasi



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		pelaksanaan langkah percepatan manajemen talenta nasional seni budaya			
		revitalisasi jalur rempah sebagai upaya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia			
		penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem kebudayaan, termasuk pengembangan pendanaan bidang kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan
		pengembangan wahana ekspresi budaya berbasis digital dalam rangka pendukung proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif			
		pengelolaan dan pemanfaatan arsip sejarah perjalanan bangsa di daerah perbatasan		Program Pembinaan Sejarah	jumlah sejarah desa/kelurahan yang dikelola
3	Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial	pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>pengembangan dialog lintas agama yang menumbuhkan sikap toleransi, inklusif, serta kerja sama dan solidaritas antarwarga</p> <p>pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: mekanisme blended finance untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, dan sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat dan Kantor Urusan Agama (KUA) percontohan ekonomi umat</p> <p>Pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Penjamin Halal (LPH)</p>			Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam			
4	Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan	peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
		peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat			
		penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa			
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
1	Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon	Perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, serta perluasan kepesertaan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan layanan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah		



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta pengembangan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT)		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni
		peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengakses rumah layak huni secara swadaya			
		penjaminan adanya integrasi hulu-hilir dalam penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan serta meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi dengan memastikan kesiapan masyarakat, kesiapan kelembagaan dalam pengelolaan, kesiapan regulasi, kesiapan pembiayaan pembangunan dan operasi pemeliharaan, serta kesiapan pembangunan infrastruktur		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>pengoordinasian di tingkat pusat dalam mendorong pemucuan perubahan perilaku masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 (lima) pilar untuk mencapai 0 persen BABS di tempat terbuka dan untuk mengakses layanan air minum perpipaan atau sumber air minum bukan jaringan perpipaan yang terlindungi secara swadaya serta untuk memilah sampah sedekat mungkin dengan sumber</p> <p>penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang berfokus untuk melengkapi rantai layanan aman serta sarana pengelolaan persampahan terpadu dan berwawasan lingkungan</p>			
2	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk pengelolaan sumber daya air	menjaga kuantitas dan kualitas sumber pasokan air melalui strategi peningkatan kinerja operasi dan keamanan bendungan eksisting, konservasi daerah tangkapan air untuk mengurangi sedimentasi di tampungan air, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran di badan air		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Debit air termanfaatkan



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>peningkatan ketersediaan dan keamanan air melalui strategi penyelesaian pembangunan 65 bendungan dan tindak lanjut pemanfaatannya, peningkatan kinerja layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan di tingkat lokal dan pengembangan food estate, serta percepatan penyediaan akses air baku yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan distribusi air bersih rumah tangga</p> <p>penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui strategi pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir untuk meningkatkan ketangguhan bencana di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, perlindungan wilayah perkotaan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, serta penguatan penyelenggaraan operasi tanggap darurat dan pemulihan di daerah pasca bencana</p>			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>peningkatan tata kelola dan pendanaan sumber daya air melalui strategi penguatan penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan (OP) untuk menjamin keberlanjutan manfaat infrastruktur sumber daya air bagi masyarakat, akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pencapaian sasaran prioritas nasional, serta peningkatan kualitas belanja tidak langsung yang akan berkontribusi pada pencapaian berbagai agenda prioritas seperti penyelesaian turunan UU Sumber Daya Air, penyusunan studi pembiayaan alternatif, reviu Pola dan Rencana Sumber Daya Air</p>			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
3	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi	mendorong pelaksanaan Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ oleh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi Keselamatan LLAJ, penanganan daerah rawan kecelakaan (blackspot) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>Peningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) prasarana perkeretaapian, pemenuhan sarana bantu navigasi pelayaran dan penerbangan terutama di daerah rawan kecelakaan pelayaran, kawasan strategis yang dilalui pelayaran dan penerbangan yang padat, penyediaan dan modernisasi sistem monitoring fasilitas Surveillance dan navigasi penerbangan terintegrasi</p> <p>optimalisasi pemanfaat DAK Transportasi Perairan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi dan pemberdayaan masyarakat bidang transportasi; dan meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan</p>			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
4	Peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi	<p>melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antarkota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan jenis komoditi</p> <p>menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas (<i>food estate</i>, industri dan pariwisata)</p> <p>melakukan standarisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan</p>		<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p>	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		Melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer, pengembangan bandara pendukung kawasan strategis untuk memenuhi standar pelayanan termasuk pembangunan bandara perairan (waterbase airport) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan dan daerah perairan			
		penataan rute penerbangan yang menghubungkan kawasan prioritas dengan kawasan penyangganya			
		pembangunan baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan			
5	Mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah 3TP, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata	penyediaan layanan reguler dan keperintisan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program tol laut bersubsidi dan jembatan udara			
		pengembangan pelabuhan laut dan penyeberangan yang memenuhi aspek standar operasional terutama pelabuhan pendukung kawasan ekonomi strategis dan daerah 3TP yang menjadi pelabuhan singgah tol laut dan layanan keperintisan laut dan penyeberangan			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		mengoptimalkan kapal feeder yang membentuk rute pengumpan dan pengumpul untuk distribusi logistik dan bahan pokok penting, sehingga meningkatkan konsolidasi kargo dan muatan balik pada pelabuhan simpul			
		pengembangan bandara pada daerah-daerah yang masih memiliki kesenjangan yang tinggi, serta bandara pendukung program jembatan udara dan keperintisan angkutan udara			
		meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran APBD, pemanfaatan skema DAK dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang			
		melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antar-infrastruktur lainnya			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
6	Peningkatan layanan infrastruktur perkotaan	pembangunan fly-over, underpass dan jalan lingkar perkotaan dalam rangka menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas pada titik kemacetan		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelayanan jalan dalam kondisi mantap
		pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, dengan memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Terbangun
		Mengembangkan angkutan komuter meliputi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan layanan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah perkotaan			
		melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema Buy the Service (BTS) dan Public Service Obligation (PSO)			
		mendorong penguatan infrastruktur TIK dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (smart city)		Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
7	Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung peningkatan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan	<p>mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau</p> <p>menyediakan subsidi listrik tepat sasaran dan bantuan penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan/atau berada di daerah 3TP, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan</p> <p>memperluas pemanfaatan tenaga listrik (electrification) untuk sektor transportasi (e-vehicle dan charging station), rumah tangga, dan industri</p> <p>mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (carbon trade)</p>			
8	Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta pendorong enabler TIK dalam pertumbuhan	mendorong percepatan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan kualitas layanannya, termasuk pada daerah non komersial dan kawasan prioritas		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital	mendorong pengelolaan sumber daya terbatas termasuk spektrum frekuensi secara optimal untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat			
		integrasi sistem dan data pemerintah melalui pemanfaatan pusat data bersama yang terstandardisasi			
		percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri dan lainnya			
		meningkatkan literasi digital masyarakat disertai dengan peningkatan etika, kecakapan digital dan penguatan keamanan informasi untuk mendukung produktivitas ekonomi			
		mendorong penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, sehat dan beradab dalam mendukung aktivitas masyarakat yang produktif			
penguatan sarana dan prasarana serta produksi penyiaran publik berkualitas dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat					



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
1	Pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis pascapandemi COVID-19	upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat	Pembangunan infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
		penanganan limbah B3 dan sampah spesifik		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian B3 dan Limbah B3
		optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Tutupan Lahan
2	Penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dengan kebijakan pada aktivitas pengurangan risiko bencana, perbaikan kualitas	penguatan data, informasi dan literasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	persentase tanggap bencana	
		penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana			persentase tanggap bencana
		peningkatan sarana prasarana kebencanaan			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
	penanganan darurat serta pemulihan pascabencana untuk membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, baik yang bersifat seketika (sudden onset disasters) seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (slow onset disasters), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim	integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana penguatan penanganan darurat bencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana penguatan sistem mitigasi multiancaman bencana terpadu			Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
3	Peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi	pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan pengembangan industri hijau rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem mangrove Penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular			

PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substansial	Bantuan keuangan kepada partai politik didukung dengan penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik Penguatan pendidikan politik, khususnya generasi muda peningkatan kapasitas dan kualitas Ormas	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Presentase Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2	Peningkatan kualitas komunikasi publik	pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi (4T) dan mengoptimalkan penggunaan media pemerintah penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah 4T	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital			
		Peningkatan literasi TIK masyarakat			
		penguatan peran lembaga independen bidang kominfo dan kapasitas SDM media dan jurnalis			
3	Politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional	peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global	Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia		
		pelindungan WNI di luar negeri sebagai respons terhadap dinamika global, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jerat hukuman mati, masalah keimigrasian, keamanan ABK, dan fasilitasi pengembalian hak finansial PMI			
		percepatan penyelesaian penetapan batas maritim			
		peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>penguatan peran sebagai prominent player di global south melalui KSST, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan dual role countries (penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya</p> <p>penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi</p>			
4	Pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan	<p>penguatan database dan sistem informasi dalam tata kelola pembentukan regulasi, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang peraturan perundang-undangan dan percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial</p> <p>perluasan implementasi digital signature dalam proses pertukaran data dan simpul SPPT-TI di seluruh wilayah</p> <p>Pelaksanaan integrasi database rekam jejak hakim</p> <p>perbaiki tata kelola eksekusi perdata di lembaga peradilan dan dukungan K/L terkait untuk mewujudkan ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu</p>	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>Indeks Reformasi Hukum</p>



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<p>penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024 dengan penambahan aksi Penguatan Partai Politik, Penataan Aset Pusat</p> <p>Perluasan akses terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, peningkatan kualitas, kuantitas Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan pemberdayaan hukum masyarakat, perlindungan hak-hak saksi dan korban, serta pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat</p> <p>penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden</p>			<p>Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</p>
5	Perbaiki tata kelola dan birokrasi	<p>penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen ASN</p> <p>penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja</p> <p>pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak</p>		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Dan Manajerial



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		penyelesaian pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit			
		penegakan disiplin ASN			
		Integrasi layanan pada portal pelayanan publik (<i>e-services</i>)		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah akses layanan publik yang terfasilitasi
		pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan		Program Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi
		koordinasi percepatan implementasi kebijakan SPBE		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Sertifikat Elektronik (SE) yang terakomodir sesuai standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
		koordinasi percepatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional			
		percepatan implementasi SRIKANDI di K/L/D			
6	Pelaksanaan perwujudan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan	penguatan kemampuan pertahanan			
		Pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara			
		Percepatan digitalisasi pelayanan kepolisian			
		penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan penguatan lembaga rehabilitasi			



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		penguatan keamanan dan ketahanan siber			
		kerja sama penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu			
		penguatan kapasitas penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna			

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan
Program Prioritas Nasional dalam RPJMN

No	RPJMN			RKPD 2024
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Kab.Majalengka	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	KP 2: Pengembangan Komoditas Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Kab.Majalengka	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab.Majalengka	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
3.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Kab.Majalengka	1.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan



No	RPJMN			RKPD 2024
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
				Masyarkakat Hukum Adat
			2.Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Desa Digital (P3PD)	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa



No	RPJMN			RKPD 2024
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Majalengka	Bina Pemerintahan Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Adimistrasi Pemerintahan Desa
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> di Desa	Kab.Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka 2024.

4.3 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistic-tematik dan integratif selain memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan kabupaten harus mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur, dan pola ruang. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Majalengka yaitu mewujudkan Kabupaten majalengka sebagai kawasan agribisnis, pariwisata dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



Tujuan penataan ruang Kabupaten Majalengka dicapai melalui sasaran:

1. Terwujudnya ruang untuk kawasan agropolitan dan minapolitan;
2. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis guna mendukung dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), aerocity, kawasan industry, pariwisata, komersial, jasa, permukiman dan lain-lain;
3. Perkotaan dan kawasan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana;
4. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta mengakomodir prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang;
5. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 39,19% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.

Kebijakan penataan ruang disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, yang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kabupaten;
3. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dijabarkan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih nyata yang selanjutnya disebut strategi yang dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kabupaten;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis, yang secara lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Majalengka, dan juga mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- 1) PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), merupakan pusat kegiatan jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. Kondisi ini terjadi di Kecamatan Kadipaten yang terletak pada simpul perlintasan utama (regional) yang menghubungkan PKN Bandung dan PKN Cirebon, sehingga merupakan kawasan perkotaan dan atau pusat kecamatan dengan kemampuan pelayanan dan kelengkapan fasilitas dan utilitas paling tinggi dibandingkan dengan pusat kecamatan lainnya.

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan di setiap kawasan andalan perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani kebutuhan kawasan andalan terkait. Fasilitas minimum yang tersedia di PKW adalah:

- Perhubungan : Pelabuhan udara, dan atau pelabuhan laut dan atau terminal tipe B
- Ekonomi : Pasar induk regional
- Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B
- Pendidikan : Perguruan tinggi

- 2) Ruang yang termasuk dalam PKW ini tidak terpaku ke dalam batas administrasi saja, akan tetapi mencakup sekitar simpul jalur utama antara koridor Bandung-Cirebon dan koridor Utara-



Selatan, sehingga ruang kecamatan yang termasuk kedalam PKW Kadipaten, selain Kecamatan Kadipaten, adalah Kecamatan Dawuan.

- 3) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) merupakan pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap PKL akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya PKL.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 ditetapkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari pusat kegiatan lokal perkotaan dan pusat kegiatan lokal perdesaan. Namun demikian, dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen No. 16/PRT/M/2009 tidak dikenal nomenklatur PKL perkotaan dan PKL perdesaan, sehingga walaupun dalam arahan RTRW Provinsi Jawa Barat untuk Kecamatan Majalengka ditetapkan sebagai PKL perkotaan, maka dalam Revisi RTRW Kabupaten Majalengka ini, Majalengka kembali menjadi PKL tanpa nomenklatur “perkotaan”. Dalam rangka mengembangkan wilayah ibu kota Kabupaten Majalengka serta untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang, maka perlu adanya perluasan wilayah perkotaan yang mencakup Kecamatan Majalengka, Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Talaga.

- 4) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. adapun kriteria penetapan PPK yaitu semua kawasan kecamatan selain PKL dan PKW merupakan PPK yaitu kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Kasokandel, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Banjaran, Leuwimunding, Rajagaluh, Sindangwangi, Argapura, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cingambul, Cikijing, dan Kecamatan Sindang.

5) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dengan kriteria sebagai berikut:

- Merupakan desa potensial/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
- Melayani satu atau lebih desa;
- Tidak termasuk kepada kawasan perkotaan

4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Majalengka, meliputi pemantapan peran dan fungsi PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari:

Tabel 4.14
Tabel Struktur Ruang Kabupaten Majalengka

STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kadipaten (Kawasan Perkotaan Kadipaten & Dawuan)	Sebagai simpul transportasi regional, pusat komersial, pusat pelayanan sosial, dan pendukung kegiatan industri
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Majalengka	Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Kertajati	Sebagai kawasan komersial dan jasa, kawasan industri terpadu, kawasan BJB, pengembangan kawasan perkotaan "aerocity", dan pertanian.
	3. Talaga	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata dan terminal regional
	4. Rajagaluh	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.
	5. Jatiwangi	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian.
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Cigasong	Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial, komersial, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan.
	2. Panyingkiran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum serta pendukung kawasan komersial, perumahan, pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan.
	3. Cikijing	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian dan peternakan, komersial, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan perkotaan, terminal regional, perikanan, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	4. Jatitujuh	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, jasa, industri dan pendukung komersial, pertanian/peternakan dan perikanan.
	5. Kasokandel	Sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan.
	6. Ligung	Sebagai kawasan pertahanan keamanan (Lanud S. Sukani), pengembangan industri dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.
	7. Sumberjaya	Sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan perdagangan dan pelayanan sosial, pertanian dan perikanan.



STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	8. Leuwimunding	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	9. Palasah	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan perkotaan, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.
	10. Argapura	<i>sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.</i>
	11. Sukahaji	<i>sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.</i>
	12. Sindangwangi	<i>sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pariwisata dan sarana pendukung pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.</i>
	13. Bantarujeg	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan pariwisata dan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
	14. Lemahsugih	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	15. Banjaran	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan), dan pengembangan pariwisata yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	16. Maja	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, perikanan, pengembangan pariwisata, dan pengembangan terminal regional yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
	17. Sindang	<i>sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.</i>
	18. Cingambul	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pariwisata, dan industri kecil yang melayani kegiatan skala antar-desa.
	19. Malausma	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pengembangan pertanian, pengembangan kawasan perbatasan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jatitujuh (Pilangsari) 2. Ligung (Kedungsari, Gandawesi) 3. Sumberjaya (Cidenok) 4. Palasah (Najasuka) 5. Jatiwangi (Sukaraja Wetan) 6. Kasokandel (Panjiwetan) 7. Panyingkiran (Cijurey) 8. Cigasong (Tajur, Karayunan) 9. Sukahaji (Jayi, Ciomas) 10. Banjaran (Parimulya) 11. Leuwimunding (Parakan) 12. Rajagaluh (Teja) 13. Sindangwangi (Padaherang) 14. Argapura (Mekarwangi) 15. Maja (Sindangmulya) 	Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, perikanan dan peternakan, pengembangan "home industri" yang melayani kegiatan skala antar desa.



STRUKTUR RUANG	KECAMATAN	FUNGSI
	16. Bantarujeg (Siliwangi, Cepeundey) 17. Lemahsugih (Mekarwangi, Sinargalih) 18. Malausma (Girimukti, Cimuncang) 19. Cingambul (Wangkelang, Sedareja) 20. Cikijing (Cisoka) 21. Sindang (Banyureja)	

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun Perubahan RKPD Kab. Majalengka Tahun 2024.

4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Perumusan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan atas pertimbangan potensi pengembangan, batasan dan daya dukung lingkungan, serta kebijakan rencana tata ruang yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan lainnya, yang meliputi

1. KAWASAN LINDUNG

- 1) SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK 87/IV-SET/2015 tentang Zonasi TN Gunung Ciremai;
- 3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Kawasan Lindung;
- 4) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 5) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 6) Peta Kawasan Rawan Bencana (PVMBG Tahun 2016);
- 7) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan.

2. KAWASAN BUDIDAYA

- 1) Rencana Pola Ruang RTRW Nasional (PP 13/2017);
- 2) Draft Rencana Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 3) Potensi Pengembangan (Pertanian, Wisata, Pertambangan, Industri, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dll);
- 4) Hasil Analisis Daya Dukung Lahan dan Kesesuaian Lahan;

- 5) Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka Tahun 2017;
- 6) Masterplan BIJB dan Kertajati Aerocity.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, maka arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Arahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

NO.	POLA RUANG	LUAS (HA)	%
A	KAWASAN LINDUNG	20.559,49	15,30
1	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	8.140,51	6,06
	Hutan Lindung	5.358,40	3,99
	Resapan Air	2.782,11	2,07
2	Kawasan Perlindungan Setempat	4.468,29	3,33
	Sempadan Sungai	4.444,09	3,31
	Sekitar Danau atau Waduk	24,20	0,02
3	Kawasan Konservasi	6.037,01	4,49
	Taman Nasional Gunung Ceremai	6.037,01	4,49
4	Kawasan Lindung Geologi	1.913,68	1,42
	Sempadan Mata Air	1.913,68	1,42
5	Kawasan Rawan Bencana	44.301,26	32,98
	Rawan Bencana Gempa Bumi	25.004,96	18,61
	Rawan Bencana Gerakan Tanah	6.667,04	4,96
	Rawan Bencana Gunung Api I	2.974,33	2,21
	Rawan Bencana Gunung Api II	2.951,72	2,20
	Rawan Bencana Gunung Api III	177,70	0,13
	Rawan Bencana Banjir	6.525,51	4,86
B	KAWASAN BUDIDAYA	113.781,33	84,70
1	Kawasan Hutan Produksi	15.581,86	11,60
	Hutan Produksi Tetap	14.142,51	10,53
	Hutan Produksi Terbatas	1.439,35	1,07
2	Kawasan Hutan Rakyat	6.513,48	4,85
3	Kawasan Pertanian	38.589,59	28,73
	Pertanian Tanaman Pangan	30.239,55	22,51
	Pertanian Holtikultura	7.518,15	5,60
	Perikanan	831,83	0,62
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	880,10	0,66
	Pertambangan Mineral	880,10	0,66
5	Kawasan Industri	3.077,71	2,29
	Kawasan Industri	1.723,78	1,35
	Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	8,24	0,01
	Industri	1.063,11	0,94
6	Kawasan Permukiman	40.303,86	30,00
	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.704,62	10,43
	Kawasan Permukiman Perdesaan	23.667,17	19,57
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	56,97	0,56
8	Kawasan Aerocity	3.480,00	2,29
9	Kawasan Bandara BIJB	1.800,00	1,34
10	Kawasan Aerotropolis	5.693,52	4,68
11	Jalan	325,27	0,24
TOTAL		134.650,71	100,00

Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Majalengka Tahun 2011-2031.

Dari tabel di atas, bahwa arahan rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 20.559,49 Ha atau sekitar 15,30% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.



Sedangkan luas arahan rencana pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Majalengka diarahkan sebesar 113.781,33 Ha atau sekitar 84,70% dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

4.3.3 Arah Pengembangan Kawasan Rebana

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, terkait penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: (1) Kabupaten Subang; (2) Kabupaten Sumedang; (3) Kabupaten Indramayu; (4) Kabupaten Majalengka; (5) Kabupaten Cirebon; (6) Kota Cirebon; dan (7) Kabupaten Kuningan. Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kawasan Rebana menjadi salah satu dari 7 (tujuh) ekonomi baru di Jawa Barat yang menjadi solusi dari dinamika dan masalah pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan eruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (enam) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2 (dua) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

Rencana aksi implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 merupakan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi:

- a. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur transportasi;



- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perhubungan;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar,
- d. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air.

Tabel 4.16
Proyek dan Program Kawasan Rebana di Kabupaten Majalengka

NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
A.	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan														12.780.000			
1.	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang – Dawuan (Seksi 3-6)	Kab Sumedang, Kab Majalengka												Kementerian PUPR	5.580.000			v
2.	Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu	Kab.Majalengka, Kab Indramayu												Kementerian PUPR	7.200.000			v
B.	Pembangunan dan Peningkatan Jalan														1.571.740			
3.	Pembangunan Jalan Akses Cisumdawu - BIJB	Kab Majalengka												a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	1.500.000	v	v	v
4.	Pembangunan Jalan Alternatif Ruas Jalan Nasional Cirebon – Ciamis (Segmen Cipasung – Cikijing – Panawangan)	Kab Kuningan, Kab Majalengka												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	50.000	v	v	
5.	Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatitujuh – Ligung	Kab Majalengka												a. Kementerian PUPR (DAK); b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	21.740	v	v	



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA		
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU
C. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat													20.000.000				
7.	Pembangunan Kereta Cepat Bandung – Kertajati	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka											Kementerian Perhubungan	20.000.000			v
D. Sarana dan Prasarana Persampahan													25.000				
8.	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Heuleut	Kec.Kadipaten, Kab Majalengka											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	25.000	v	v	
E. Sarana dan Prasarana Permukiman													5.200.000				
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap I	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan sebagian konstruksi)	2.100.000	v	v	v
10.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya (SPAM Jatigede) Tahap II	Kab.Sumedang, Kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kota Cirebon											a. Kementerian PUPR; b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	3.100.000	v	v	v
F. Pembangunan Waduk/Bendungan													1.300.000				
11.	Pembangunan Waduk/Bendungan Kadumalik	Kab.Majalengka, Kab.Sumedang											Kementerian PUPR	1.300.000	v		
G. Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir													305.300				
12.	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB (Normalisasi Sungai Cibolerang,	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka											Kementerian PUPR	150.000	v		



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPBU	
	Revitalisasi Situ Cijawura dan Cimaneuh)																	
13.	Program Pengembangan Desa Konservasi	100 Desa di Kab.Subang, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan											a. Kementerian KLHK b. Pemerintah Daerah (Pemberdayaan Masyarakat) c. BUMN/BUMD/Swasta	155.300	v	v	v	
H.	Sumber Daya Manusia												500.000					
14.	Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II	Kec.Panyingkiran, Kab.Majalengka											a. Kementerian PUPR b. Kementrian Dikbud-Ristek c. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan)	500.000	v	v	v	
I.	Daya Saing Kawasan												188.000					
15.	Pembangunan Gedung <i>Creative Center</i>	Kab.Cirebon, Kab.Majalengka, Kab.Kuningan											a. Kementerian Parekraf (Sarana dan Prasarana) b. Pemerintah Daerah (Lahan, Dokumen Perencanaan dan Bangunan)	63.000	v	v		
16.	Pembangunan Gedung Pusat Budaya	Kota Cirebon, Kab.Indramayu, Kab.Majalengka, Kab.Sumedang											Pemerintah Daerah	25.000		v		
17.	Pengembangan desa digital	Kab.Majalengka, Kab.Subang, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang											a. Kementerian Kominfo b. Kementerian Desa dan PDTT c. Pemerintah Daerah (Dokumen Perencanaan)	100.000	v	v		



NO.	PROYEK DAN PROGRAM	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN (20..)										PENANGGUNG JAWAB	INDIKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)	SUMBER DANA			
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			APBN	APBD	BUMN/ BUMD/ SWASTA/ KPB	
J.	Sarana dan Prasarana Kesehatan														350.000			
18.	Pembangunan Rumah Sakit Cideres Tipe B	Kab.Majalengka												a. Kementerian Kesehatan b. Pemerintah Daerah (Lahan dan Dokumen Perencanaan) c. Swasta	350.000	v	v	V
K.	Infrastruktur Energi														3.930.000			
19.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sangkahurip Ciremai	Kab.Kuningan, Kab.Majalengka												Kementerian ESDM	3.930.000	v		v
L.	Pengembangan Kawasan Industri														2.280.000			
20.	Pengembangan Kawasan Industri Kertajati	Kec.Kertajati, Kab.Majalengka												Swasta	2.280.000			v

Ket:

■ Tahap Persiapan ■ Tahap Konstruksi

Sumber : Perpres 87 Tahun 2021.



4.4 Inovasi Pembangunan

Inovasi merupakan sebuah proses untuk mengatasi masalah dalam arti lebih luas melakukan sesuatu dengan cara baru ketika terjadi perubahan situasi dan rutinitas tidak berjalan, manusia melakukan eksperimen dan belajar, lebih singkatnya inovasi adalah mengembang ide baru kedalam produk atau proses baru (Cozzen dan Catalan. 2008). Seringkali permasalahan sosial yang ada dan kompleks tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa sehingga diperlukan terobosan/perubahan pada sistem yang ada agar sistem itu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. **Inovasi dalam pembangunan daerah** dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima serta peningkatan daya saing daerah.

4.4.1 Inovasi pada Proses Perencanaan

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah daerah merupakan suatu sistem aplikasi yang berbasis teknologi informasi secara online untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan proses perencanaan pembangunan mulai dari pengumpulan hingga pengolahan data mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan serta tepat waktu. Melalui penerapan aplikasi SIPD, maka penyusunan rencana program dan kegiatan pada RKPD dapat memiliki manfaat dari sisi transparansi, keamanan, satu pintu dan bersifat real time. Pada penyusunan RKPD tahun 2024 penggunaan SIPD sudah dipergunakan ketika pengajuan usulan dari desa/kelurahan untuk proses musrenbang baik tingkat Kecamatan, Kabupaten bahkan Provinsi. Proses penyampaian Pokok-pokok Pikiran Dewan secara transparan dapat dimonitor oleh para pemangku kepentingan.

Gambar 4.3
Tampilan Muka Aplikasi SIPD-RI



Sumber : web sipd-ri.kemendagri.go.id

2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Bimbingan Teknis Perencanaan Kecamatan Melalui e-RENJA”

E-RENJA ini adalah sebuah aplikasi elektronik yang menyediakan template sistematika penulisan narasi dokumen Renja. Aplikasi e-RENJA ini merupakan upaya memberikan peningkatan pelayanan bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya template narasi Renja ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi perangkat daerah Kecamatan ketika menyusun narasi Renja karena ada sistematika baku yang sudah ditetapkan dalam aplikasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

Kebaruan/keunikan, nilai tambah dan keunggulan dari inovasi e-Renja adalah:

- a. Memudahkan PD Kecamatan dalam menyusun narasi dokumen Renja setiap tahunnya, karena ada panduan/template;
- b. Memudahkan Bappedalitbang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dokumen Renja Kecamatan (format seragam dan bisa diakses secara online);
- c. *Paperless*, tidak perlu lagi di print untuk proses assistensi dan verifikasi dokumen;
- d. Pengumpulan dokumen Renja Kecamatan menjadi lebih cepat dan mudah;

- e. Bisa direplikasi untuk penyusunan narasi dokumen Renja Dinas/Badan dengan penyesuaian pada kinerja pelayanan karena Dinas/badan melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang jadi kewenangannya;

Gambar 4.4
Tampilan Muka Aplikasi E-Renja

The screenshot shows the 'Rekap Hasil Renja' (Summary of Renja Results) page in the E-Renja application. The page features a sidebar menu on the left and a main content area with a table. The table is titled 'Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra' and contains columns for 'No.', 'Program', 'Indikator Kinerja Program', 'Target Rencana Kerja Kabupaten (RKA) Periode', 'Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Indikator Kinerja V di Kabupaten Majalengka', 'Target & Realisasi Kinerja Program & Indikator Kinerja Tahun', 'Target Program dan Indikator Kinerja Tahun', and 'Persentase Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Indikator Kinerja Tahun (2022)'. The table lists various programs under the 'Program Admistratif Pemerintahan' category, such as 'Pembinaan Desa dan Pengabdian Masyarakat (DPM)', 'Pembinaan Jasa Penyunggi Pemerintahan Admistratif Pemerintahan (DPA)', and 'Pembinaan Bidang Usahawan dan Pengabdian Masyarakat (DPA)'. Each row shows the target and actual performance for the year 2022.

Sumber : Aplikasi E-Renja Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.

4.4.2 Inovasi pada Proses Program/Kegiatan Perangkat Daerah

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commmercial institutions*). Prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Menurut PKDSP¹ yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:

- 1) Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- 2) Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- 3) Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- 4) Industri dan kerajinan rakyat.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada



BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan BUMDes masih terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya BUMDes ini, khususnya di Kecamatan Cigasong. BUMDes yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah dan menganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena merupakan hibah dari pemerintah.

Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik, terkadang banyak masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMDes. Walaupun dalam pelaksanaannya, BUMDes di Kecamatan Cigasong telah menerima bantuan CSR dari beberapa pihak swasta dan sering mengadakan pelatihan, namun pada kenyataannya adalah BUMDes se-Kecamatan Cigasong belum mempunyai keunggulan dalam bidang usahanya tersebut secara signifikan dan belum terasa manfaatnya untuk masyarakat dikarenakan kurangnya minat, kemampuan dan keberanian dari masyarakat desa itu sendiri untuk mengembangkan potensi kewirausahaan, sehingga baik dari pihak pengurus maupun pihak masyarakat masih kurang kesadaran dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya di sektor riil dan usaha mikro.

Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan unit kerja, mengidentifikasi beberapa masalah yang patut dipertimbangkan untuk dicarikan solusinya yaitu :

- 1) Kurangnya fasilitasi serta pengelolaan produk BUMDes di desa-desa se-Kecamatan Cigasong



- 2) Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cigasong
- 3) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat di desa-desa se-Kecamatan Cigasong

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bahwa kurang optimalnya kegiatan, fasilitasi serta pengelolaan produk Bumdes di Desa-Desa Se-Kecamatan Cigasong. Maka dari itu melalui Program Kegiatan Inovasi penggunaan Media Sosial “Lapak BAGJA” & Pengemasan Kekinian di Wilayah Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menjadi sebuah solusi dalam permasalahan tersebut.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pergeseran dan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 baik dari sisi nomenklatur maupun anggaran, khususnya akibat perubahan kondisi fiskal pemerintah daerah.

Penyesuaian tersebut terdiri dari penyempurnaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, penyesuaian, serta terjadi perubahan target pendapatan tahun 2024 yang menyebabkan perlunya penyesuaian baik dari struktur pendanaan, maupun pengurangan pada anggaran program dan kegiatan, serta beberapa kondisi yang akan disampaikan lebih lanjut pada bab ini. Sebagaimana penjelasan di atas maka dirumuskan beberapa kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 diantaranya:

1. Penyesuaian Pendapatan;
2. Penyesuaian Pembiayaan Tahun 2024;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pemenuhan Kegiatan Prioritas Kabupaten yang didanai melalui Bantuan Keuangan, DAK, dan DBHCHT;
5. Penyesuaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan realisasi penganggaran tahun 2024 belum optimal serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka adalah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 2 (dua) pergeseran atau Perubahan Parsial, sebagai berikut:

1. Perubahan Parsial I, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
2. Perubahan Parsial II, diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024.

5.1. Kronologis Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dalam perjalannya mengalami 2 (dua) kali pergeseran atau Perubahan Parsial. Pergeseran tersebut tentunya didasari atas adanya regulasi baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara jelas kronologis pergeseran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Parsial I** dilaksanakan **pada tanggal, 12 Februari 2024**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, yaitu terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang memuat rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024, terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 314/KU.01.03.07/BPKAD, Perihal: Penyampaian Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF, serta terdapat kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Parsial).

Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, dengan melakukan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, yaitu terdapat penambahan **Pendapatan Daerah** sebesar **Rp 115.339.071.314,00** (*seratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah*) dari semula sebesar **Rp 3.036.147.022.404,00** (*tiga triliun tiga puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*) menjadi sebesar **Rp 3.151.486.093.718,00** (*tiga triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). **Belanja Daerah** mengalami kenaikan sebesar **Rp 115.339.071.314,00** (*seratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat belas rupiah*). Semula sebesar **Rp 3.049.947.022.404,00** (*tiga triliun empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*) menjadi sebesar **Rp 3.165.286.093.718,00** (*tiga triliun seratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). Sehingga total APBD pada Perubahan Parsial I sebesar **Rp 3.180.286.093.718,00** (*tiga triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).

2. Perubahan Parsial II dilaksanakan **pada tanggal, 4 Juli 2024**, pergeseran tersebut berkaitan dengan terbitnya regulasi baru

yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan Perubahan Parsial I ditetapkan, yaitu terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5/20741/Keuda, Perihal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, DBH DR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas, Otsus serta TDF; terbitnya Surat dari BKKBN Nomor :161/PK.01/F1/ 2024, Perihal: Perubahan harga BKB Kit Stunting, Rekomendasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk bencana banjir Kertajati; terbitnya hasil verifikasi anggaran bantuan keuangan khusus provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024; sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Bupati Nomor: 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 (Perubahan Parsial II).

Dilaksanakan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024, perubahan parsial sebagaimana dimaksud tidak mengalami penambahan pendapatan maupun penambahan Belanja Daerah sehingga hanya bersifat pergeseran antar belanja sehingga komposisi Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah tetap yaitu: 1. **Pendapatan Daerah** sebesar **Rp 3.151.486.093.718,00** (*tiga triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). 2. **Belanja Daerah** sebesar **Rp 3.165.286.093.718,00** (*tiga triliun seratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*). 3. **Pembiayaan Daerah** sebesar **Rp 13.800.000.000** (*tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah*), sehingga total APBD pada Perubahan Parsial II sebesar **Rp 3.180.286.093.718,00** (*tiga triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh*

enam juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

5.2. Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2024 dalam Perubahan RKPD Tahun 2024

Setelah melakukan Parsial I dan II pada APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan penyesuaian belanja daerah yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan target pendapatan tahun 2024 yang diakibatkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan terdapat perubahan regulasi terkait;
2. Terdapat beberapa penambahan prioritas yang perlu dianggarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dukungan terhadap kegiatan prioritas nasional atau kegiatan strategis provinsi;
3. Pada kategori Belanja, yang akan dilakukan penyesuaian antara lain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari pusat (DAK dan DBHCHT) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bankeu).

Berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada perubahan tahun 2024, sedangkan rinciannya akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 ini.



Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun 2024			
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan
1.	Dinas Pendidikan	1.072.295.654.553	1.109.299.408.289	1.109.299.408.289	1.109.299.408.289
2.	Dinas Kesehatan	208.985.012.042	229.695.960.814	229.695.960.814	229.695.960.814
3.	Puskesmas Argapura	2.650.723.296	2.650.723.296	2.650.723.296	2.650.723.296
4.	Puskesmas Maja	4.145.995.466	4.145.995.466	4.145.995.466	4.145.995.466
5.	Puskesmas Sukahaji	2.432.118.704	2.432.118.704	2.432.118.704	2.432.118.704
6.	Puskesmas Talaga	5.010.621.578	5.010.621.578	5.010.621.578	5.010.621.578
7.	Puskesmas Sumberjaya	3.748.741.298	3.748.741.298	3.748.741.298	3.748.741.298
8.	Puskesmas Cikijing	4.902.670.342	4.902.670.342	4.902.670.342	4.902.670.342
9.	Puskesmas Cingambul	2.887.767.670	2.887.767.670	2.887.767.670	2.887.767.670
10.	Puskesmas Majalengka	2.490.372.286	2.490.372.286	2.490.372.286	2.490.372.286
11.	Puskesmas Kertajati	1.795.722.891	1.795.722.891	1.795.722.891	1.795.722.891
12.	Puskesmas Leuwimunding	3.777.611.542	3.777.611.542	3.777.611.542	3.777.611.542
13.	Puskesmas Ligung	4.252.562.837	4.252.562.837	4.252.562.837	4.252.562.837
14.	Puskesmas Kadipaten	3.347.565.452	3.347.565.452	3.347.565.452	3.347.565.452
15.	Puskesmas Jatiwangi	3.743.329.746	3.743.329.746	3.743.329.746	3.743.329.746
16.	Puskesmas Salagedang	1.385.332.284	1.385.332.284	1.385.332.284	1.385.332.284
17.	Puskesmas Munjul	2.109.209.396	2.109.209.396	2.109.209.396	2.109.209.396
18.	Puskesmas Lemahsugih	2.458.144.013	2.458.144.013	2.458.144.013	2.458.144.013
19.	Puskesmas Jatitujuh	2.586.849.586	2.586.849.586	2.586.849.586	2.586.849.586
20.	Puskesmas Banjaran	2.077.526.642	2.077.526.642	2.077.526.642	2.077.526.642
21.	Puskesmas Loji	2.785.726.919	2.785.726.919	2.785.726.919	2.785.726.919
22.	Puskesmas Rajagaluh	3.434.485.571	3.434.485.571	3.434.485.571	3.434.485.571



No.	Perangkat Daerah	Tahun 2024			
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan
23.	Puskesmas Sindangwangi	2.428.050.000	2.428.050.000	2.428.050.000	2.428.050.000
24.	Puskesmas Kasokandel	2.927.495.675	2.927.495.675	2.927.495.675	2.927.495.675
25.	Puskesmas Panyingkiran	2.301.744.886	2.301.744.886	2.301.744.886	2.301.744.886
26.	Puskesmas Malausma	3.310.829.685	3.310.829.685	3.310.829.685	3.310.829.685
27.	Puskesmas Margajaya	2.505.300.343	2.505.300.343	2.505.300.343	2.505.300.343
28.	Puskesmas Panongan	1.472.861.332	1.472.861.332	1.472.861.332	1.472.861.332
29.	Puskesmas Balida	2.463.213.460	2.463.213.460	2.463.213.460	2.463.213.460
30.	Puskesmas Waringin	2.747.543.156	2.747.543.156	2.747.543.156	2.747.543.156
31.	Puskesmas Sindang	1.693.038.604	1.693.038.604	1.693.038.604	1.693.038.604
32.	Puskesmas Bantarujeg	4.415.975.714	4.415.975.714	4.415.975.714	4.415.975.714
33.	Puskesmas Sukamulya	1.689.460.138	1.689.460.138	1.689.460.138	1.689.460.138
34.	Puskesmas Cigasong	2.567.777.893	2.567.777.893	2.567.777.893	2.567.777.893
35.	Labkesda Majalengka	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000
36.	RSUD Talaga	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
37.	RSUD Majalengka	165.097.273.950	177.070.794.113	177.070.794.113	181.473.473.820
38.	RSUD Cideres	223.814.306.337	216.056.526.233	216.056.526.233	242.950.232.713
39.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	147.022.800.007	181.214.058.008	182.214.058.008	182.814.058.008
40.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37.001.369.524	37.001.369.524	37.001.369.524	37.501.369.524
41.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.032.768.412	5.032.768.412	5.256.008.412	5.256.008.412
42.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17.367.632.889	17.367.632.889	17.367.632.889	17.667.632.889
43.	Dinas Sosial	11.768.195.655	12.186.926.696	12.186.926.696	12.186.926.696



No.	Perangkat Daerah	Tahun 2024			
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan
44.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.612.629.298	26.964.629.298	26.964.629.298	26.964.629.298
45.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	20.603.238.006	20.603.238.006	20.603.238.006	20.603.238.006
46.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	49.273.703.680	49.870.403.680	49.870.403.680	49.870.403.680
47.	Dinas Lingkungan Hidup	15.402.883.271	16.802.883.271	16.802.883.271	16.802.883.271
48.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.417.244.790	7.417.244.790	7.417.244.790	7.417.244.790
49.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.471.119.860	21.443.927.693	21.443.927.693	22.243.927.693
50.	Dinas Perhubungan	23.271.054.024	23.271.064.806	23.271.064.806	23.271.064.806
51.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.790.027.708	7.201.000.252	7.781.000.252	8.381.000.252
52.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.185.549.616	6.185.549.616	6.185.549.616	6.185.549.616
53.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	21.427.730.682	21.427.730.682	21.427.730.682	21.427.730.682
54.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	5.219.959.078	5.219.959.078	5.219.959.078	5.219.959.078
55.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.748.075.854	9.056.305.262	9.056.305.262	9.056.305.262
56.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.975.508.867	10.975.508.867	10.975.508.867	11.175.508.867
57.	Sekretariat Daerah	75.545.995.227	75.545.996.227	75.545.996.227	76.295.996.227
58.	Sekretariat DPRD	76.961.638.384	76.961.638.384	76.961.638.384	76.961.638.384



No.	Perangkat Daerah	Tahun 2024			
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan
59.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11.449.151.312	11.500.522.880	11.620.522.880	11.900.522.780
60.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	501.548.436.726	499.272.986.726	496.890.026.726	511.890.026.726
61.	Badan Pendapatan Daerah	18.293.897.323	18.293.897.323	18.393.897.323	18.393.897.323
62.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.759.518.815	22.466.055.385	22.616.055.385	22.616.055.385
63.	Inspektorat	12.023.864.987	12.023.864.987	12.023.864.987	12.023.864.987
64.	Kecamatan Majalengka	16.306.523.800	16.306.523.800	16.306.523.800	16.406.523.800
65.	Kecamatan Jatiwangi	3.150.196.126	3.150.196.126	3.150.196.126	3.250.196.126
66.	Kecamatan Palasah	2.121.723.817	2.121.723.817	2.121.723.817	2.221.723.817
67.	Kecamatan Sumberjaya	2.089.071.534	2.089.071.534	2.089.071.534	2.189.071.534
68.	Kecamatan Leuwimunding	2.269.874.770	2.269.874.770	2.269.874.770	2.369.874.770
69.	Kecamatan Rajagaluh	2.786.409.634	2.786.409.634	2.786.409.634	2.886.409.634
70.	Kecamatan Sindangwangi	2.702.624.957	2.702.624.957	2.723.364.957	2.823.364.957
71.	Kecamatan Sindang	2.447.821.232	2.447.821.232	2.447.821.232	2.547.821.232
72.	Kecamatan Sukahaji	2.591.103.279	2.591.103.279	2.591.103.279	2.691.103.279
73.	Kecamatan Maja	2.627.034.971	2.627.034.971	2.627.034.971	2.727.034.971
74.	Kecamatan Argapura	2.670.799.597	2.670.799.597	2.670.799.597	2.770.799.597
75.	Kecamatan Cigasong	6.561.864.176	6.561.864.176	6.561.864.176	6.661.864.176
76.	Kecamatan Malausma	2.312.280.622	2.312.280.622	2.312.280.622	2.412.280.622
77.	Kecamatan Talaga	2.471.203.395	2.471.203.395	2.471.203.395	2.571.203.395
78.	Kecamatan Dawuan	2.527.018.196	2.527.018.196	2.527.018.196	2.627.018.196
79.	Kecamatan Banjaran	2.393.268.463	2.393.268.463	2.393.268.463	2.493.268.463



No.	Perangkat Daerah	Tahun 2024			
		Murni	Pergeseran 1	Pergeseran 2	Perubahan
80.	Kecamatan Bantarujeg	2.315.693.379	2.315.693.379	2.351.033.379	2.451.033.379
81.	Kecamatan Lemahsugih	2.209.272.492	2.209.272.492	2.296.462.492	2.396.462.492
82.	Kecamatan Cingambul	2.690.758.719	2.690.758.719	2.757.208.719	2.857.208.719
83.	Kecamatan Cikijing	2.408.548.489	2.408.548.489	2.408.548.489	2.508.548.489
84.	Kecamatan Panyingkiran	2.047.149.293	2.047.149.293	2.047.149.293	2.147.149.293
85.	Kecamatan Kadipaten	2.695.726.318	2.695.726.318	2.695.726.318	2.795.726.318
86.	Kecamatan Kasokandel	2.348.806.403	2.348.806.403	2.348.806.403	2.448.806.403
87.	Kecamatan Kertajati	2.736.121.996	2.736.121.996	2.736.121.996	2.836.121.996
88.	Kecamatan Jatitujuh	2.619.518.142	2.619.518.142	2.619.518.142	2.719.518.142
89.	Kecamatan Ligung	2.926.805.308	2.926.805.308	2.926.805.308	3.026.805.308
90.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.057.194.014	41.332.654.014	41.332.654.014	41.832.654.014
Jumlah		3.049.947.022.404	3.165.286.093.718	3.165.286.093.718	3.218.712.479.805

Sumber: SIPD RI Tahun 2024.

BAB VI

P E N U T U P

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi dan situasi yang terjadi pada kurun waktu sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan percepatan pencapaian target indikator makro, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan merupakan dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang harus segera dibuat setelah perubahan RKPD ini ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berupa pergeseran kegiatan pada perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan terdapat substansi yang tidak mengalami perubahan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan ekonomi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Majalengka. Tema Pembangunan pada tahun 2024 adalah **“Penguatan Stabilitas Keamanan, Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat”** sehingga pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka harus memiliki kebermanfaatan untuk kesejahteraan ekonomi demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Semua rangkaian ketetapan program, kegiatan, sub kegiatan, strategi pembangunan, dan kebijakan-kebijakan keuangan



daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mengukung pencapaian target-target pembangunan tahun 2024.

Pj. BUPATI MAJALENGKA

ttd

DEDI SUPANDI